

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan
di Pulau Jawa Tahun 2021-2023**

Skripsi



Disusun Oleh :

Nama : Pandu Hastha Darendra
Nomor Mahasiswa : 18313306
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2025

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan
di Pulau Jawa Tahun 2021-2023**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh :

Nama	: Pandu Hastha Darendra
Nomor Mahasiswa	: 18313306
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

"Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan plagiasi karya orang lain seperti dalam buku pendoman penyusunan Skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku"

Yogyakarta, 20 November 2024


Pandua E 

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan
di Pulau Jawa Tahun 2021-2023

Nama : Pandu Hastha Darendra
Nomor Mahasiswa : 18313306
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 8 Januari 2025
telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing



(Moh. Bakti Hendrie Anto, SE., M.Sc.)



Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D.
NIK. 963130101

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS
AKHIR/SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa
Tahun 2019-2023**

Disusun oleh : PANDU HASTHA DARENDRA

Nomor Mahasiswa : 18313306

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan
Lulus pada hari tanggal: Rabu, 08 Januari 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Moh.Bekti Hendrie Anto, SE., M.Sc.

Penguji : Prof. Dr. Drs. Unggul Priyadi, M.Si.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas rahmat dan nikmat ALLAH SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2021-2023”. Skripsi ini dipersembahkan untuk seluruh masyarakat di berbagai pulau khususnya Pulau Jawa

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan umat muslim baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa kita menuju zaman dengan penuh ilmu. Skripsi ini disusun dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2021-2023” yang dapat diselesaikan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Adapun tujuan penyusunan skripsi sebagai syarat menyelesaikan pendidikan serta memperoleh gelar Sarjana Strata Satu S-1 pada jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Islam Indonesia.

Penyusunan skripsi yang dilakukan masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk mencapai kesempurnaan. Dalam penyusunan skripsi penulis mendapat banyak bantuan, arahan, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan restu kepada penulis. Terimakasih atas dukungan, pengertian, dan pengorbanan yang tidak dapat tergantikan.
2. Bapak selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi, dengan berbesar hati mengucapkan terimakasih atas ilmu, arahan, kesempatan, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
4. Teman-teman yang telah berjuang bersama untuk menyelesaikan pendidikan di almamater ini.

Penulis menerima berbagai macam kritik serta saran demi kesempurnaan skripsi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN UJIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Sistematikan Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	10
2.1 Kajian Pustaka	10
2.2 Landasan Teori.....	14
2.2.1 Tingkat Kemiskinan.....	14
2.2.2 Upah Minimum Kabupaten/Kota.....	15
2.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	16
2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia.....	17
2.2.5 Jumlah Penduduk	18
2.3 Hubungan Antar Variabel.....	19
2.4 Hipotesis Penelitian	22
2.5 Kerangka Penelitian	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data	23

3.2	Definisi Operasional.....	23
3.2.1	Variabel Dependen.....	23
3.2.2	Variabel Independen.....	23
3.3	Metode Analisis	24
3.4	Penentuan Model Estimasi	26
3.4.1	Uji Chow.....	26
3.4.2	Uji Hausman	26
3.5	Uji Hipotesis	27
3.5.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	27
3.5.2	Uji t (Parsial).....	27
3.5.3	Uji F (Simultan)	27
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN		28
4.1	Deskripsi Data Penelitian.....	28
4.2	Hasil dan Analisis Data	29
4.2.1	Uji Penentuan Model Estimasi.....	29
4.2.2	Hasil Uji Statistik	30
4.3	Pembahasan	35
4.3.1	Hubungan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Tingkat Kemiskinan.....	35
4.3.2	Hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan.....	36
4.3.3	Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan.....	37
4.3.4	Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan.....	37
BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI		39
5.1	Simpulan.....	39
5.2	Implikasi	40
DAFTAR PUSTAKA		41
LAMPIRAN.....		45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Pustaka	12
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Diskriptif Variabel	28
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow	29
Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman	29
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>Fixed Effect Model</i>	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Nilai Tingkat Kemiskinan Pada Enam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2023	2
Gambar 1.2 Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pada Enam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2023	3
Gambar 1.3 Nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pada Enam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2023	4
Gambar 1.4 Nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota Pada Enam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2023	5
Gambar 1.5 Nilai Pertumbuhan Penduduk Pada Enam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2023	6
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	22
<i>Gambar 4. 1</i> Koefisien Intersep Cros Effect	33
<i>Gambar 4. 2</i> Koefisien Intersep Period Effect	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Tingkat Kemiskinan	46
Lampiran 2 Data Upah Minimum Kabupaten/Kota	49
Lampiran 3 Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	52
Lampiran 4 Data Indeks Pembangunan Manusia	55
Lampiran 5 Data Jumlah Penduduk	68
Lampiran 6 Hasil Deskriptif Statistik	61
Lampiran 7 Hasil Penentuan Model Estimasi	62
Lampiran 8 Hasil Uji Common Effect	63
Lampiran 9 Hasil uji Random Effect	64
Lampiran 10 Hasil uji Fixed Effect	65
Lampiran 11 Hasil Uji Koefisien Intersept Pembeda Cross Effect	66
Lampiran 12 Hasil Uji Koefisien Intersept Period Effect	69

ABSTRAK

Tingkat kemiskinan merupakan indikator yang baik mengenai taraf hidup warganya. Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain timbulnya banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara salah satunya Indonesia. Pulau Jawa memiliki tren penurunan tingkat kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi angka tersebut masih relatif tinggi mengingat Pulau Jawa merupakan pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, tingkat partisipasi angkatan kerja, Indeks Pembangunan Manusia dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2021-2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan data *time series* dan *cross section*. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Pulau Jawa yaitu, Upah Minimum Kabupaten/Kota memiliki tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2021-2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2021-2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2021-2023, dan Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2021-2023.

Kata kunci : Tingkat Kemiskinan, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Jumlah Penduduk

ABSTRACT

The poverty rate is a good indicator of the standard of living of its citizens. There are many negative impacts caused by poverty, besides the emergence of many social problems, poverty can also affect the economic development of a country, one of which is Indonesia. Java Island has a downward trend in the poverty rate in recent years, but the rate is still relatively high considering that Java Island is the center of Indonesia's economic growth. The purpose of this study is to analyze the effect of Regency / City Minimum Wage, labor force participation rate, Human Development Index and population on the poverty rate in Java Island in 2021-2023. The data used in this study are secondary data sourced from the Central Bureau of Statistics. The method used in this research is panel data regression using time series and cross section data. The results showed that the factors that influence the poverty rate in Java Island, namely, the Regency / City Minimum Wage has a positive but insignificant effect on the poverty rate in all districts / cities in Java Island in 2021-2023, the Labor Force Participation Rate has a negative and insignificant effect on the poverty rate in all districts / cities in Java Island in 2021-2023, The Human Development Index (HDI) has a negative and significant effect on the poverty rate in all districts/cities in Java Island in 2021-2023, and the Total Population has a positive and significant effect on the poverty rate in all districts/cities in Java Island in 2021-2023.

Keywords: Poverty Rate, District/City Minimum Wage, Labor Force Participation Rate, Human Development Index (HDI), and Total Population

BAB I

PENDAHULUAN

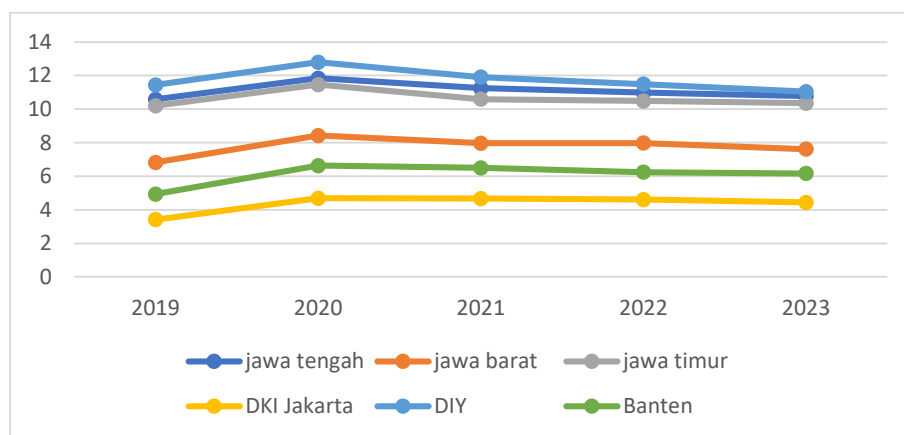
1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah tujuan dari suatu negara, di mana negara tersebut semakin maju ketika ada peningkatan pada pembangunannya. Kesejahteraan sosial merupakan kondisi dimana seseorang mampu melengkapi segala keperluan dan mampu melakukan relasi positif dengan lingkungan sekitar. Kesejahteraan merupakan keadaan di mana seseorang merasa aman, makmur dan bebas dari berbagai ancaman masalah ataupun kesulitan (Witono, 2020). Ancaman masalah ini mencakup dari berbagai aspek yaitu masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan masalah makanan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan sosial adalah kemiskinan.

Menurut Sinurat (2023), tingkat kemiskinan suatu negara atau daerah merupakan indikator yang baik mengenai taraf hidup warganya. Kemiskinan merupakan permasalahan serius di Indonesia yang masih berada pada jalur pembangunan ekonomi. Badan Pusat Statistik (2023) menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 mencapai sebesar 25,90 juta orang, dengan rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan besaran Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.592.657,- per rumah tangga miskin dalam satu bulannya.

Kemiskinan membawa dampak negatif yang luas, tidak hanya meningkatkan berbagai permasalahan sosial tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi. Sianipar et al. (2022), menegaskan bahwa tingginya angka kemiskinan memaksa pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran dalam program sosial, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Salsabila et al. (2022), yang menyatakan bahwa peningkatan tingkat kemiskinan berbanding lurus dengan penurunan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara makro. Selain itu, kemiskinan juga dapat memperburuk ketimpangan sosial yang berujung pada peningkatan angka kriminalitas dan ketidakstabilan sosial.

Pulau Jawa, yang menjadi pusat ekonomi dan politik Indonesia, mencatatkan tingkat kemiskinan yang signifikan meskipun merupakan wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023, tingkat kemiskinan di Pulau Jawa pada tahun 2023 tercatat sekitar 9,5% dari total populasi. Meskipun terdapat tren penurunan tingkat kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, angka tersebut masih relatif tinggi mengingat Pulau Jawa merupakan pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun tingkat kemiskinan di enam Provinsi yang ada di Pulau Jawa sebagai berikut:



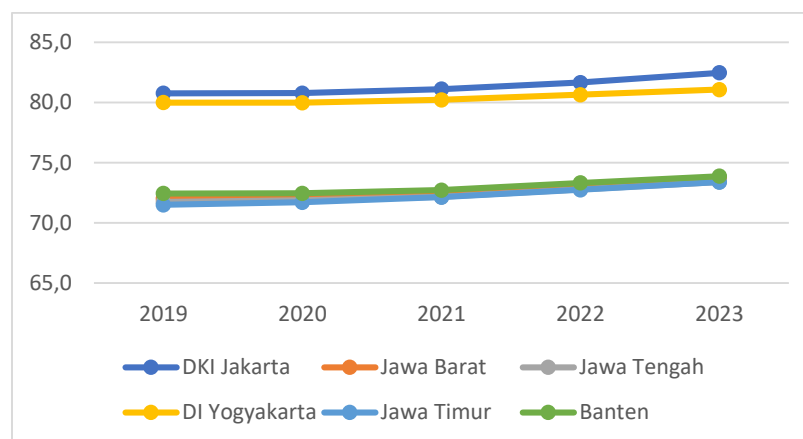
Sumber : Data Pusat Statistik, 2023

Gambar 1.1
Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2019-2023

Sebanyak enam provinsi yang ada di Pulau Jawa, mengalami fluktuasi tingkat kemiskinan dari tahun 2019 hingga 2023. Jawa Tengah meningkat dari 2019-2020 mencapai 1,7%, dan turun pada 2021-2023 dengan rata-rata kemiskinan sebesar 10,77%. Jawa Barat menunjukkan kenaikan tingkat kemiskinan dari 2019-2020 mencapai 1,9%, dan menurun hingga 2023 dengan rata-rata sebesar 7,62%. Jawa Timur juga mengalami peningkatan pada 2020 sebesar 1,2%, yang kemudian turun dari 2021-2023 dengan rata-rata sebesar 10,35%. Daerah Istimewa Yogyakarta memperlihatkan peningkatan kemiskinan yang lebih ringan pada 2020 mencapai 1,4%, diikuti dengan penurunan bertahap hingga 2023 dengan rata-rata 11,04%. DKI Jakarta memiliki tingkat kemiskinan yang paling rendah di antara semua provinsi lain. Dengan kenaikan pada 2020 yaitu sebesar 0,6%, dan menurun hingga 2023 dengan rata-rata sebesar 4,44%. Banten menunjukkan peningkatan kemiskinan pada 2020 mencapai 1,2%, dengan penurunan pada 2022-2023 dengan rata-rata kemiskinan sebesar 6,17%.

Berdasarkan data diatas peningkatan kemiskinan terjadi mulai pada tahun 2019-2020. Menurut Paelongan & Sandi, (2019), al ini dapat terjadi karena belum tercapainya penggunaan penuh tenaga kerja serta dampak pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Pandemi menyebabkan banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, peningkatan jumlah pengangguran, serta penurunan pendapatan rumah tangga. Meskipun jumlah kemiskinan setiap tahunnya mengalami penurunan, namun presentase kemiskinan Pulau Jawa masih lebih tinggi dibandingkan presentase kemiskinan nasional, untuk itu diperlukan usaha pemerintah dalam mengambil kebijakan guna menekan angka kemiskinan di Pulau Jawa.

Salah satu sumber yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu terobosan dalam menilai pembangunan manusia. Suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakatnya juga tinggi, atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan rendah (Elviera & Irawan, 2020). Berikut ini adalah persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada enam Provinsi di Pulau Jawa.



Sumber : Data Pusat Statistik, 2023

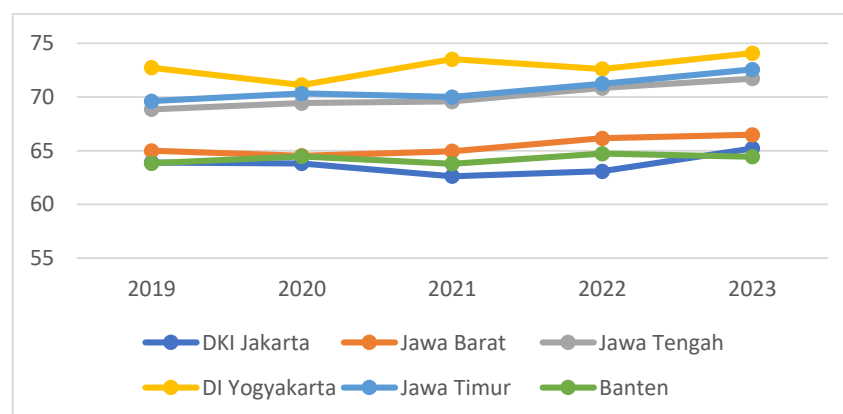
Gambar 1.2
Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pada Enam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2023

Gambar diatas menunjukkan diagram terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2019 hingga 2023 untuk provinsi di Pulau Jawa. Dari data ini, terlihat bahwa DKI Jakarta konsisten memimpin dengan IPM tertinggi setiap tahunnya, dimana pada tahun 2023 mencapai angka 82,5%. Hal ini menandakan bahwa kualitas

pembangunan manusia yang lebih baik di DKI Jakarta. Sedangkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten memiliki IPM yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Dimana tercatat IPM pada tahun 2023 di Provinsi Jawa Barat sebesar 73,7%, Jawa Tengah sebesar 73,4%, Jawa Timur sebesar 73,4%, dan Banten sebesar 73,9%.

Apabila data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diatas dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di enam provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2019-2023. Didapatkan bahwa meskipun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di berbagai provinsi di Pulau Jawa dari 2019-2023 menjadi indikator positif, hal ini secara langsung mengurangi tingkat kemiskinan. Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang memiliki IPM lebih rendah tetap mengalami kemiskinan yang tinggi, terutama pada masa awal pandemi COVID-19, dimana IPM yang meningkat belum tentu mampu mengatasi fluktuasi ekonomi dan dampak sosial yang terjadi.

Faktor yang berpengaruh selanjutnya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Angkatan kerja yang tumbuh dengan cepat jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan maka akan menyebabkan tingkat pengangguran yang meningkat dan pada akhirnya mempengaruhi kemiskinan karena tingkat pendapatan menjadi unsur penentu kesejahteraan penduduk (Herliana, 2020). Berikut ini adalah persentase tingkat partisipasi angkatan kerja pada enam Provinsi di Pulau Jawa.

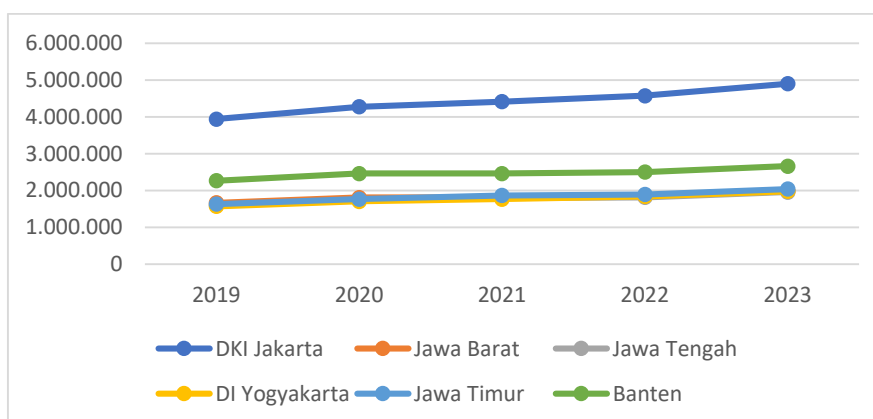


Sumber : Data Pusat Statistik, 2023

Gambar 1.3
Nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pada Enam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2023

Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada enam provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2019-2023 diatas menunjukkan adanya perbedaan antar provinsi. Daerah Istimewa Yogyakarta secara konsisten mencatatkan TPAK tertinggi di antara provinsi-provinsi lainnya, dengan nilai yang cenderung meningkat pada tahun 2023 dengan nilai 74,08. Sementara itu, Banten mencatatkan TPAK terendah, meskipun mengalami peningkatan dari tahun 2021 tetapi pada tahun 2023 hanya tercatat sebesar 64,44 TPAK. Apabila data ini dibandingkan dengan tingkat kemiskinan. Didapatkan peningkatan TPAK sering kali diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan, karena semakin banyak orang yang bekerja seharusnya dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi kemiskinan. Namun, data menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam TPAK di sebagian besar provinsi, fluktuasi tingkat kemiskinan tetap terjadi.

Faktor selanjutnya yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota, dimana menurut Priseptian & Primandhana (2022), menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja dengan demikian dapat mengurangi kemiskinan. Berikut ini adalah nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota pada enam Provinsi di Pulau Jawa.

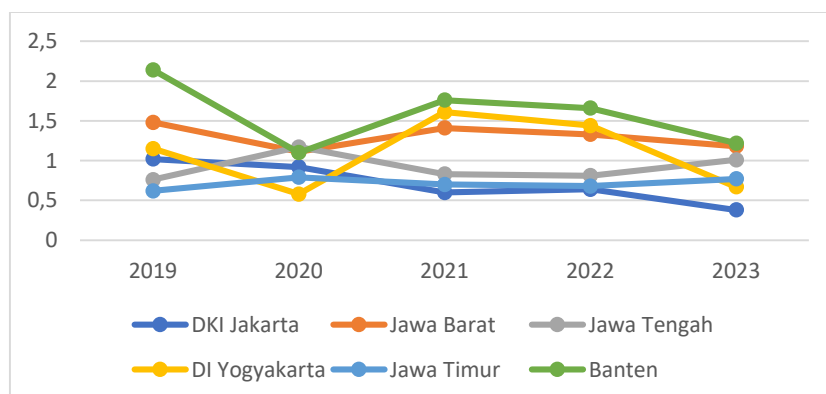


Sumber : Data Pusat Statistik, 2023

Gambar 1.4
Nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota Pada Enam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2023

Data upah minimum Kabupaten/Kota pada enam provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2019-2023 diatas menunjukkan adanya perbedaan. DKI Jakarta konsisten memiliki UMK tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain, dengan kenaikan yang stabil dari tahun ke tahun. Pada 2023, UMK di DKI Jakarta sebesar Rp. 4.901.798,00. Sedangkan Jawa Tengah dan DI Yogyakarta memiliki tingkat pertumbuhan UMR yang paling rendah di antara semua Provinsi. Dimana pada tahun 2023 tercatat UMR DI Yogyakarta sebesar Rp. 1.981.782,00 dan Jawa Tengah sebesar Rp. 1.958.169,00. Apabila data ini dibandingkan dengan tingkat kemiskinan. Didapatkan upah minimum Kabupaten/Kota memiliki peran penting dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Provinsi dengan UMR yang lebih tinggi seperti DKI Jakarta cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Namun Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang memiliki UMR lebih rendah dibandingkan beberapa provinsi lain tetap mencatat tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

Faktor yang terakhir adalah pertumbuhan penduduk, dimana menurut Menurut Nelson dan Leibstein dalam Sembiring et al (2023), terdapat pengaruh langsung antara penambahan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibstein menunjukan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin. Berikut ini adalah nilai pertumbuhan penduduk pada enam Provinsi di Pulau Jawa.



Sumber : Data Pusat Statistik, 2023

Gambar 1.5
Nilai Pertumbuhan Penduduk Pada Enam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2023

Data pertumbuhan penduduk pada enam provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2019-2023 diatas terlihat bahwa setiap provinsi mengalami fluktuasi. DKI Jakarta menunjukkan penurunan dari 2019-2023. Dimana tercatat tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2023 hanya mencapai 0,38%. Sementara itu, Banten mengalami kenaikan tajam pada tahun 2021 tetapi kemudian menunjukkan penurunan yang konsisten hingga 2023 yaitu tercatat sebesar 1,22% tingkat pertumbuhan penduduk dan menjadi nilai tertinggi dibanding Provinsi lain. Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam IPM di berbagai provinsi, tingkat kemiskinan masih menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan tantangan ekonomi yang signifikan, terutama di provinsi-provinsi dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang fluktuatif dan dampak sosial-ekonomi yang beragam.

Penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan (2020), disebutkan bahwa secara parsial dan simultan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, hal ini berarti jika terdapat perubahan UMK dan IPM sebesar 1% maka akan menyebabkan perubahan penurunan terhadap tingkat kemiskinan di suatu daerah. Penelitian oleh Purba et al (2024), juga menyebutkan bahwa jumlah penduduk dan tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Indonesia, meningkatnya tingkat jumlah penduduk yang diikuti dengan partisipasi angkatan kerja pada suatu daerah dapat meningkatkan pendapatan perkapita serta taraf konsumsi yang kemudian akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sehingga dengan partisipasi angkatan kerja yang tinggi akan menyebabkan penurunan kemiskinan.

Berdasarkan berbagai faktor yang telah diuraikan, bahwa meskipun pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi terus meningkat di Pulau Jawa, tantangan kemiskinan masih menjadi isu utama yang memerlukan intervensi kebijakan yang lebih komprehensif. Penelitian mengenai kemiskinan di Pulau Jawa menjadi penting karena wilayah ini merupakan pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi masih memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi. Menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, memahami pola perubahan tingkat kemiskinan di berbagai provinsi dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai efektivitas program pemerintah serta tantangan yang dihadapi

dalam menanggulangi kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Jawa.

Berdasarkan penjelasan diatas, pengurangan tingkat kemiskinan adalah sesuatu yang harus dilakukan. Oleh karena itu, kontribusi pemerintah sangat berperan terhadap penurunan dan peningkatan tingkat kemiskinan, dan empat faktor yang secara tidak langsung mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), tingkat partisipasi angkatan kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan jumlah penduduk. Sehingga peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam tentang **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2021-2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2021-2023?
2. Bagaimana pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2021-2023?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2021-2023?
4. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2021-2023
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2021-2023
3. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2021-2023

4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2021-2023

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan atau literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian bagi pembaca, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Pulau Jawa
2. Penelitian ini diharapkan sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan dalam mengatasi masalah kemiskinan, termasuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, dan penentu kebijakan pemerintah secara umum dalam mengatasi kemiskinan di Pulau Jawa

1.5 Sistematikan Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Bab ini menyajikan kajian pustaka yang berisi pengkajian dari hasil penelitian sebelumnya, landasan teori, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini terdapat jenis dan cara pengumpulan data, definisi variabel operasional, dan metode analisis.

BAB IV : Hasil Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini memaparkan deskripsi data penelitian, hasil analisis dan pembahasan.

BAB V : SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Pada bab ini menyajikan simpulan dan implikasi yang diambil peneliti dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Penelitian ini melakukan rujukan dengan menggunakan penelitian sebelumnya pada topik yang relevan sebagai sumber referensi untuk mengembangkan penelitian. Adapun referensi yang digunakan sebagai kajian pustaka pada penelitian ini, antara lain:

Tuwonaung et al (2022), meneliti terkait pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, produk domestik regional bruto, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Kota Bintung. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk, PDRB, pengeluaran pemerintah dan pengangguran mampu memberikan pengaruh yang positif serta signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Bitung.

Ashari & Athoillah (2023), meneliti terkait pengaruh tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di kawasan Tapal Kuda. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan tingkat partisipasi angkatan kerja, pengangguran terbuka, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang terjadi di kawasan Tapal Kuda.

Miftah et al (2024), meneliti terkait determinan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kuantitatif dengan analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan dengan tingkat kemiskinan, sedangkan indeks gini ini berpengaruh positif dan signifikan dengan tingkat kemiskinan.

Herlambang & Rachmawati (2023), meneliti terkait pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Metode penelitian yang

digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis data panel berupa *Random Effect Model* (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara PDRB dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan.

Sagala et al (2024), meneliti tentang pengaruh kelayakan hidup dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan di 10 Provinsi termiskin di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian asosiatif dengan analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelayakan hidup mampu berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan nilai PDRB sendiri dinyatakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada 10 Provinsi termiskin di Indonesia.

Saputra et al (2024), meneliti terkait pengaruh tingkat pengangguran terbuka, upah minimum provinsi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian asosiatif dengan analisis data menggunakan regresi linier berganda berupa uji simultan dan uji parsial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum memiliki pengaruh yang paling tinggi terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak yang positif terhadap tingkat kemiskinan.

Ayudia et al (2024), meneliti terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan pada daerah tertinggal di Pulau Sumatera berdasarkan tipologi klassen. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian tipologi klassen dan regresi data pane. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan tipologi klassen terdapat 46 kabupaten yang tergolong daerah relatif tertinggal. TPT memberikan dampak positif terhadap kemiskinan di daerah-daerah tertinggal di Pulau Sumatera. Sebaliknya, PDRB dan RLS memberikan dampak yang negatif.

Berdasarkan penjabaran terkait kajian penelitian diatas, maka dapat ditampilkan dalam bentuk sederhana sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kajian Pustaka

Peneliti	Tujuan	Hasil
Tuwonaung et al, 2022 Metode penelitian : analisis regresi linier berganda	Menganalisis pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, produk domestik regional bruto, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Kota Bitung	Jumlah penduduk, PDRB, pengeluaran pemerintah dan pengangguran mampu memberikan pengaruh yang positif serta signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Bitung
Ashari & Athoillah, 2023 Metode penelitian : menggunakan analisis data panel	Menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Dengan variabel independen berupa UMR, tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk.	Secara simultan variabel yang digunakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan
Miftah et al, 2024 Metode penelitian : analisis regresi linier berganda	Menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Dengan variabel independen berupa UMR, tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk.	Pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan dengan tingkat kemiskinan, sedangkan indeks gini berpengaruh positif dan signifikan dengan tingkat kemiskinan
Herlambang & Rachmawati, 2023 Metode penelitian : menggunakan analisis data panel berupa <i>Random Effect Model</i> (SEM)	Menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Dengan variabel independen berupa jumlah penduduk	Terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara PDRB dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan.

Sagala et al, 2024 Metode penelitian : analisis regresi linier berganda	Menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Menggunakan variabel kelayakan hidup dan PDRB sebagai variabel independen.	Kelayakan hidup mampu berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan nilai PDRB sendiri dinyatakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan
Saputra et al, 2024 Metode penelitian : analisis regresi linier berganda dengan uji parsial dan simultan	Menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, dengan menggunakan variabel upah minimum variabel independen.	Upah minimum memiliki pengaruh yang paling tinggi terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak yang positif terhadap tingkat kemiskinan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Tingkat Kemiskinan

Menurut Mubyarto (1998) dalam Yasa (2019), kemiskinan adalah situasi serba kekurangan disebabkan oleh terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan ketrampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan. Jadi kemiskinan yaitu suatu kondisi ketidakmampuan dan ketidakberdayaan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak.

Kemiskinan juga didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar kebutuhan minimum, yang dikenal sebagai garis batas kemiskinan atau garis kemiskinan yang terdiri dari dua komponen yaitu : garis kemiskinan makanan dan non makanan. Menurut Badan Pusat Statistik, nilai standar kebutuhan minimum makanan mengacu pada harga dan tingkat konsumsi dari 52 jenis bahan makanan dengan batas kecukupan makanan yang mampu menghasilkan energi 2.100 kalori/kapita /hari, sedangkan non makanan terdiri dari 27 paket komoditi untuk perkotaan dan 25 komoditi untuk perdesaan yang dalam hal ini mewakili pola konsumsi penduduk kelas bawah, dengan batas kecukupan non makanan ditetapkan sebesar nilai rupiah yang dikeluarkan oleh penduduk kelas bawah untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum non makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan aneka barang jasa lainnya (Badan Pusat Statistik, 2020).

Menurut Kominfo (2015), kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain :

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup
2. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan
3. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik

Maipita (2014) mengutip pendapat Isdjoyo menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab kemiskinan baik di lingkungan perkotaan ataupun perdesaan antara lain:

1. Ketidakberdayaan, kondisi ini muncul karena kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya harga produk yang dihasilkan, dan tingginya biaya pendidikan.

2. Keterkucilan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keahlian, sulitnya transportasi, serta ketiadaan akses terhadap kredit menyebabkan mereka terkucil dan menjadi miskin.
3. Kemiskinan materi, kondisi ini diakibatkan kurangnya modal, dan minimnya lahan pertanian yang dimiliki menyebabkan penghasilan relatif rendah.
4. Kerentanan, sulitnya mendapatkan pekerjaan, pekerjaan musiman, dan bencana alam, menyebabkan mereka menjadi rentan dan miskin.
5. Sikap, sikap yang menerima apa adanya dan kurang termotivasi untuk bekerja keras membuat mereka menjadi miskin. Kemiskinan di kota disebabkan oleh faktor-faktor yang sama seperti di desa,

2.2.2 Upah Minimum Kabupaten/Kota

Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 31 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja atau buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Upah minimum adalah upah terendah yang diterima buruh dan merupakan patokan untuk jenis upah yang lain termasuk upah harian, upah borongan dimana upah tersebut dalam sebulan tidak boleh kurang dari nilai upah minimum yang telah ditetapkan dan berlaku di setiap Provinsi atau Kabuten/Kota (Aryanti, 2016). Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak yaitu setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang ditetapkan oleh Menaker. Pencapaian kebutuhan hidup layak perlu dilakukan secara bertahap karena kebutuhan hidup minimum yang sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dunia usaha (Gujarati & Porter, 2015).

Menurut Aryanti (2016), pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa jenis Upah minimum sebagai berikut:

1. Upah minimum sub sektoral regional; upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan pada sub sector tertentu dalam daerah tertentu
2. Upah minimum sektoral regional, upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan pada sector tertentu dalam daerah tertentu
3. Upah minimum regional/upah minimum provinsi, upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan dalam daerah tertentu. Upah minimum regional (UMR)/UMP di tiap-tiap daerah besarnya berbeda-beda.

2.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan besaran persentase dari angkatan kerja terhadap jumlah penduduk yang telah memasuki umur diatas seputuh tahun. Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk menentukan besaran persentase penduduk pada usia kerja yang telah aktif secara ekonomi di suatu negara atau daerah. Secara umum dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja maka semakin tinggi pula jumlah tenaga kerja yang telah mampu dan siap untuk ikut dalam kegiatan produksi barang maupun jasa (Badan Pusat Statistik, 2021).

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dapat didefinisikan sebagai ukuran proporsi populasi manusia kerja suatu negara atau mencari pekerjaan. Ini memberikan indikasi ukuran pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa, relatif terhadap populasi pada usia kerja. TPAK menghitung jumlah orang dalam angkatan kerja sebagai presentase 20 dari penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah jumlah dari orang yang bekerja dan tidak bekerja, sedangkan populasi penduduk usia kerja adalah penduduk di atas usia kerja biasanya 15 tahun keatas (Gatiningsih, 2017).

Menurut Badan Pusat Statistik (2021), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) dengan jumlah penduduk usia kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Partisipasi angkatan kerja juga dapat diukur dengan TPAK yang berguna untuk mengetahui besarnya persentase penduduk usia kerja (dalam hal ini usia 15-64 tahun) yang berpotensi untuk aktif menjadi tenaga kerja di suatu negara. Nilai TPAK yang

tinggi menggambarkan tingginya kontribusi penduduk usia kerja yang bekerja atau tidak menganggur.

2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli (*purchasing power parity*). Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu (Gatiningsih, 2017)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (Badan Pusat Statistik, 2019)

Menurut Badan Pusat Statistik, (2019), penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya:

1. Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
2. Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
3. Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar.
4. Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

2.2.5 Jumlah Penduduk

Menurut seseorang ahli yaitu Kartomo Wirosuhardjo penduduk merupakan sejumlah orang yang mendiami suatu daerah tertentu. Dengan pengertian demikian, bisa disebutkan bahwa seseorang yang menetap di suatu daerah merupakan penduduk, bisa Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Orang yang tinggal dalam suatu daerah pasti akan terikat kepada sosial, budaya, politik, dan hak kewajiban yang ada pada daerah yang ditinggali oleh orang tersebut (Hutasoid, 2017).

Bentuk penduduk dapat berupa umur, jenis kelamin, agama, mata pencaharian, bahasa, tempat tinggal dan lain-lain. Dari pengertian di atas bahwa penduduk adalah seluruh orang yang menempati suatu daerah atau negara. Banyaknya orang yang menempati suatu daerah atau negara akan menentukan kepadatan penduduk. Sedangkan jumlah penduduk merupakan jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dengan jumlah penduduk menyangkut kepentingan pembangunan (Gatiningsih, 2017)

Penduduk menurut Badan Pusat Statistik (2022), adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Jumlah penduduk dihitung dengan metode sensus atau juga bisa dengan metode penghitungan pertumbuhan penduduk.

Menurut Aryanti (2016), berdasarkan jumlah penduduk terdapat tiga alasan pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan, sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi di masa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumber daya perkapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat yang pada gilirannya membuat investasi dalam kualitas manusia semakin sulit

2. Banyak negara yang penduduknya masih sangat tergantung dengan sektor pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antara sumberdaya alam yang langka dan penduduk. Sebagian karena pertumbuhan penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktifitasnya ke sektor pertanian modern dan pekerjaan modern lainnya
3. Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat. Bermekarnya kota-kota di NSB membawa masalah-masalah baru dalam menata maupun mempertahankan tingkat kesejahteraan warga.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Tingkat Kemiskinan

Upah merupakan unsur penting yang berpengaruh terhadap kehidupan para pekerja karena upah merupakan sumber pendapatan seseorang untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Upah merupakan imbalan yang diberikan pengusaha kepada pekerja atas pekerjaan yang mereka lakukan. Semakin tinggi upah minimum maka pendapatan masyarakat pun akan meningkat sehingga dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat serta terbebas dari kemiskinan (Yono & Amelia, 2021). Upah minimum menjadi batas pemberian upah yang diberikan perusahaan. Tujuan ditetapkannya upah minimum adalah menjadi jaring pengaman bagi pekerja untuk mendapatkan upah di atas upah minimum yang telah ditetapkan. Semakin tinggi upah minimum yang ditetapkan, maka semakin tinggi pula pendapatan seseorang sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan lain sebagainya. Upah sangat erat hubungannya dengan kemampuan seseorang guna memenuhi kebutuhannya (Gatiningsih, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Putra & Yasa (2020), dalam penelitian yang dilakukan Upah Minimum juga berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Upah minimum dapat meningkatkan kondisi perekonomian pekerja dan juga berkontribusi pada upaya pengentsan kemiskinan pada pekerja yang terkena dampak peraturan ini. Upah minimum menggeser employment pada pekerjaan

dengan upah tinggi. Peraturan pasar tenaga kerja ini dapat meningkatkan rata-rata produktivitas dan juga meningkatkan kesejahteraan.

2.3.2 Hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya *output* dari suatu kegiatan ekonomi, sehingga semakin banyak penduduk yang produktif maka akan menghasilkan *output* yang tinggi pula dan hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan begitupula pada pendapatan per kapita. Dimana meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja di suatu daerah berarti meningkat pula pendapatan perkapita dan tingkat konsumsi yang mempengaruhi berkurangnya tingkat kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2021).

Menurut Purbowati (2019), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan gambaran besarnya penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Semakin tinggi partisipasi angkatan kerja maka akan semakin sedikit penduduk miskin. Kemampuan kerja seseorang secara langsung mempengaruhi pendapatan yang akan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Menurut Rowntree dalam Ayudia et al. (2024), ketenagakerjaan dipercaya menjadi jalan keluar terbaik dari situasi kemiskinan. Banyaknya tenaga kerja yang aktif dalam bekerja bisa meningkatkan pendapatan yang mempengaruhi meningkatkan pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluar dari kemiskinan.

2.3.3 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan

Todaro (2013) juga mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia memainkan tujuan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern untuk membangun kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (*longevity*), dan hidup

sehat (healthy life), untuk mendapatkan pengetahuan (the knowledge) dan mempunyai akses kepada sumber daya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan.

Apriliyah Furqoni et al (2019), mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Indeks Pembangunan Manusia memiliki indikator komposit dalam penghitungannya antara lain angka harapan hidup, angka melek huruf, dan konsumsi per kapita. Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta pendapatan per kapita memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, sehingga semakin tinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah.

2.3.4 Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menyebabkan kegagalan mencapai tujuan pembangunan ekonomi, yaitu kesejahteraan rakyat, serta meningkatkan angka kemiskinan. Semakin besar jumlah penduduk dapat berdampak positif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini terbukti dari perhitungan indeks Foster Greer Thorbecke (FGT), di mana peningkatan jumlah penduduk berkontribusi pada peningkatan kemiskinan (Todaro (2013).

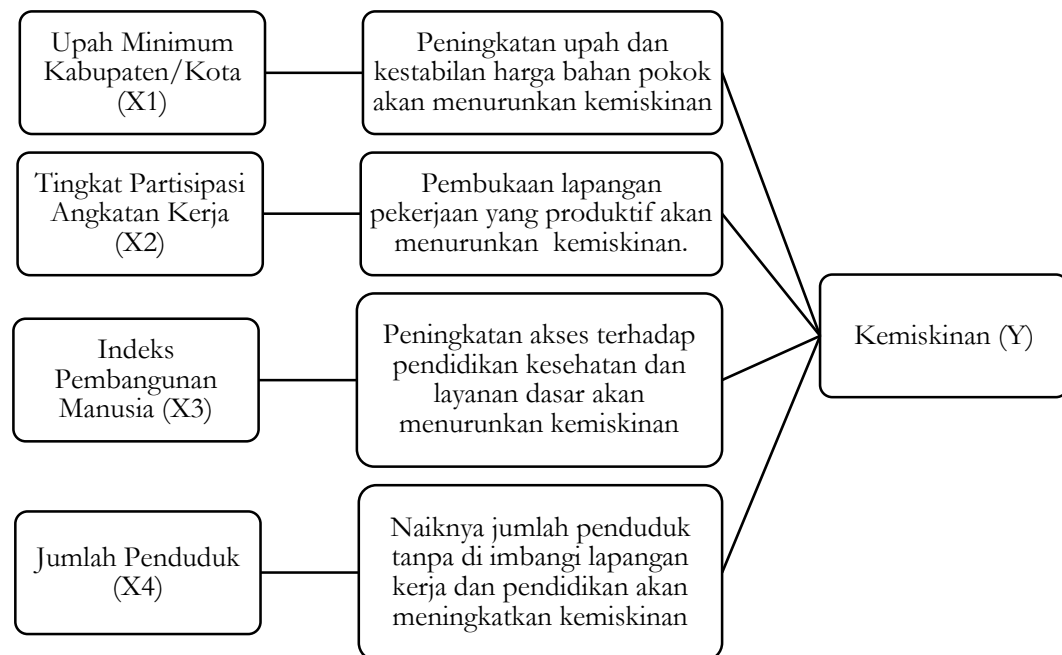
Aprilianti et al (2022) juga menemukan dalam penelitian mereka tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan menggunakan metode panel data bahwa jumlah penduduk memiliki hubungan positif dengan tingkat kemiskinan. Menurut Nelson dan Leibstein dalam Hutasoid (2017), terdapat pengaruh langsung antara penambahan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibstein menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin.

2.4 Hipotesis Penelitian

Terdapat beberapa hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Diduga Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di seluruh Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2021-2023
2. Diduga tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2021-2023
3. Diduga indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2021-2023
4. Diduga jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2021-2023

2.5 Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel yang menggabungkan data *time series* dan data *cross section*. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu penggunaan analisis data statistik untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018). Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, Data sekunder merupakan data bersumber dari kepustakaan baik berupa jurnal, majalah, artikel maupun hasil penelitian sebelumnya yang masih terdapat kaitanya dengan penelitian yang akan dilakukan (Sugiyono, 2018). Dimana dalam penelitian ini digunakan data data *time series* yang diambil dari Badan Pusat Statistik pada kurun waktu 3 tahun yaitu tahun 2021-2023 dengan data yang diambil yaitu berupa data tingkat kemiskinan, upah minimum Kabupaten/Kota, tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk. Selanjutnya data *cross section* yang digunakan berupa data dari 119 Kabupaten/Kota yang tersebar pada 6 Provinsi di Pulau Jawa yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2 Definisi Operasional

3.2.1 Variabel Dependen

Tingkat kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan disebabkan oleh terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan ketrampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan. Data yang digunakan adalah data dalam persentase tingkat kemiskinan di 119 Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Jawa pada Tahun 2021-2023 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.2.2 Variabel Independen

1. Upah Minimum Kabupaten/Kota

Upah minimum adalah upah terendah yang diterima buruh dan merupakan patokan untuk jenis upah yang lain termasuk upah harian, upah borongan dimana upah tersebut dalam sebulan tidak boleh kurang dari nilai upah minimum yang telah

ditetapkan dan berlaku di setiap Provinsi atau Kabupaten/Kota. Data yang digunakan adalah data upah minimum Kabupaten/Kota dalam juta rupiah di 119 Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Jawa pada Tahun 2021-2023 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) dengan jumlah penduduk usia kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Data yang digunakan adalah data tingkat partisipasi angkatan kerja dalam persen di 119 Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Jawa pada Tahun 2021-2023 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Data yang digunakan adalah data indeks pembangunan manusia dalam persen di 119 Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Jawa pada Tahun 2021-2023 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

4. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Data yang digunakan adalah data jumlah penduduk dengan penghitungan pertumbuhan penduduk dalam satuan persen di 119 Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Jawa pada Tahun 2021-2023 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.3 Metode Analisis

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data panel (*pooled data*), atau gabungan dari data *time series* dan data *cross section* (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini digunakan data *time series* berupa tingkat kemiskinan, upah minimum Kabupaten/Kota, tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks pembangunan manusia dan

jumlah penduduk. Data yang diambil berupa data pada kurun waktu tahun 2021-2023 dan data *cross* dengan 119 Kabupaten/Kota yang tersebar pada 6 Provinsi di Pulau Jawa yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun model penelitian yang digunakan yaitu :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y = Tingkat Kemiskinan

β_0 = Konstanta

$\beta_{1,2,3,4,5}$ = Koefisien regresi variabel independen

X_1 = Upah Minimum Kabupaten/Kota

X_2 = Tingkat partisipasi angkatan kerja

X_3 = Indeks pembangunan manusia

X_4 = Jumlah penduduk

i = 5 Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

t = Tahun 2021-2023

e = Komponen error

Menurut Ahmadien & Susanto (2020), terdapat tiga model estimasi regresi data panel yang dapat dilakukan antara lain:

1. *Common Effect*

Model estimasi ini merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Hasil regresi pada metode ini akan lebih baik daripada regresi yang menggunakan data *cross section* atau hanya menggunakan data *time series* saja. Hal ini karena dengan menggabungkan data *time series* dan data *cross section* dapat menghasilkan observasi yang lebih banyak. Didapatkan persamaan dalam metode ini sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

2. *Fixed Effect*

Model estimasi ini merupakan data panel pada variabel dummy untuk mengetahui perbedaan intercept. Metode pendekatan efek tetap (*fixed effect model*) adalah model yang mengasumsikan koefisien kemiringan konstan tetapi intersepnya bervariasi antar individu. Didapatkan persamaan dalam metode ini sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + \beta_5 D_{1i} + \beta_6 d_{2i} \dots + e_{it}$$

Keterangan:

D : Dummy

3. *Random Effect*

Metode estimasi ini merupakan regresi panel dengan melibatkan asumsi koefisien slop konstan dan intercept berbeda antara individu dan antar waktu. Dalam model efek acak (*Random Effect*). Dalam model ini parameter yang berbeda lintas wilayah dan lintas waktu berkontribusi terhadap kesalahan. Didapatkan persamaan dalam metode ini sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + v_{it} v_{1i} = e_{it} + u_i$$

3.4 Penentuan Model Estimasi

3.4.1 Uji Chow

Uji *Chow* merupakan uji yang digunakan untuk menentukan model yang dipilih antara *fixed effect* model dan *random effect* model. Dengan kriteria yaitu :

1. Apabila nilai probabilitas *cross section* F lebih dari 0,05 (*cross section* $F > 0,05$), maka model yang terpilih adalah *common effect*,
2. Apabila nilai probabilitas *cross section* F kurang dari 0,05 (*cross section* $F < 0,05$), maka model yang terpilih adalah *fixed effect*.

3.4.2 Uji Hausman

Uji *Hausman* merupakan uji yang digunakan untuk menentukan model yang dipilih antara *fixed effect* atau *random effect*. Dengan kriteria yaitu :

1. Apabila nilai probabilitas lebih dari 0,05 (*probabilitas* $> 0,05$), maka model yang terpilih adalah *randomn effect*.
2. Apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05(*probabilitas* $< 0,05$), maka model yang terpilih adalah *fixed effect*.

3.5 Uji Hipotesis

3.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini bertujuan untuk menentukan berapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dengan ketentuan :

1. Apabila nilai R^2 kecil (mendekati nol), maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dan variabel dependen tidak terdapat keterkaitan.
2. Apabila nilai R^2 mendekati 1, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat baik sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dan variabel dependen terdapat keterkaitan.

3.5.2 Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan ketentuan :

1. Apanila nilai signifikan $< 0,05$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen
2. Apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

3.5.3 Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang dapat menjelaskan variabel berikutnya. Dengan ketentuan :

1. Apabila F statistik $< 0,05$ maka terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen
2. Apabila F statistik $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data panel yaitu terdiri dari data *time series* dan *cross-sectional*. Data *time series* mencakup periode tahun 2021 hingga 2023, sedangkan data *cross-sectional* bersumber dari 1119 kabupaten/kota yang tersebar pada 6 Provinsi di Pulau Jawa. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Kemiskinan, dengan variabel independen berupa Upah Minimum Kabupaten/Kota, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, dan Jumlah Penduduk. Analisis data dilakukan dengan menggunakan program *software* Eviews 12. Hasil dari uji statistik adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	Mean	Maximum	Minimum	Std.deviation
Tingkat Kemiskinan	9,777171	23,76000	2,380000	3,949630
Upah Minimum Kabupaten/Kota	2..845.666	4.793.331,2	1.770.000	2.583.414
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,444490	82,99000	56,86000	4,615483
Indeks Pembangunan Manusia	73,70415	88,61000	62,80000	5,336700
Jumlah Penduduk	1,608768	5,440000	0,070000	1,155494

Sumber: Hasil pengolahan Eviews

Tabel 4.1 diatas menunjukkan nilai deskriptif dari setiap variabel, dimana didapatkan padaa variabel Tingkat Kemiskinan dengan nilai mean 9,777171 pada nilai maximum 23,76000 dan minimum 2,380000. Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan nilai mean 2..845.666 pada nilai maximum 4.793.331,2 dan minimum 1.770.000. Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dengan nilai mean 69,444490 pada nilai maximum 82,99000 dan minimum 56,86000. Variabel Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai mean 73,70415 pada nilai maximum 88,61000 dan minimum 62,80000. Variabel Jumlah Penduduk dengan nilai mean 1,608768 pada nilai maximum 5,440000 dan minimum 0,070000.

4.2 Hasil dan Analisis Data

4.2.1 Uji Penentuan Model Estimasi

Uji penentuan model estimasi pada data panel dilakukan dengan dua jenis uji, yaitu pertama uji chow untuk menentukan antara model *common effect* dan *fixed effect*. Kedua, uji hausman untuk memutuskan model antara *fixed effect* dan *random effect*. Adapun hasil dari uji penentuan model ini sebagai berikut

4.2.1.1 Uji Chow

Uji chow digunakan untuk menentukan estimasi antara model *common effect* dan *fixed effect*, dengan ketentuan akhir yaitu apabila nilai probabilitas *cross section F* $> 0,05$, maka model terpilih adalah *common effect*. Sebaliknya apabila nilai probabilitas *cross section F* $< 0,05$, maka model terpilih adalah *fixed effect*. Adapun hasil dari uji chow sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Probabilitas
Cross-section F	192,090194	(118,234)	0,0000
Cross-section Chi-square	1636,344895	118	0,0000

Sumber: Hasil pengolahan Eviews

Tabel 4.2 menunjukkan hasil dari uji chow, dimana didapatkan nilai *cross section F* sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$), sehingga model yang terpilih berdasarkan uji chow adalah model *fixed effect model* (FEM)

4.2.1.2 Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk menentukan estimasi antara model *fixed effect* dan *random effect*, dengan ketentuan akhir yaitu apabila nilai probabilitas $> 0,05$, maka model terpilih adalah *random effect*. Sebaliknya apabila nilai probabilitas $< 0,05$, maka model terpilih adalah *fixed effect*. Adapun hasil dari uji hausman sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Square Statistic	Chi-Square d.f	Probabilitas
Cross-section F	38,875490	4	0,0000

Sumber: Hasil pengolahan Eviews

Tabel 4.3 menunjukkan hasil dari uji hausman, dimana didapatkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$), sehingga model yang terpilih berdasarkan uji chow dan hausman adalah model *fixed effect model* (FEM).

4.2.2 Hasil Uji Statistik

4.2.2.1 Uji Regresi *Fixed Effect Model*

Setelah melalui pemilihan model terbaik menggunakan uji chow dan uji hausman, hasil estimasi menunjukkan bahwa model *fixed effect* adalah yang paling sesuai, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji *Fixed Effect Model*

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Probabilitas
C	60,91359	2,482678	24,53544	0,0000
Upah Minimum Kabupaten/Kota	3,91E-09	9,82E-09	0,398562	0,6906
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-0,013478	0,011694	-1,152601	0,2503
Indeks Pembangunan Manusia	-0,684813	0,037613	-18,20700	0,0000
Jumlah Penduduk	0,162828	0,058700	2,773913	0,0060
R-squared	0,995004	F-statistic		381,9885
Adjusted R-squared	0,992399	Prob(F-statistic)		0,000000

Sumber: Hasil pengolahan Eviews

Berdasarkan tabel 4.4, maka persamaan estimasi untuk *fixed effect model* sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

$$TK = 60,91359 + 0,00000000391UMR - 0,013478 TPAK - 0,684813 IPM + 0,162828 JP$$

Hasil estimasi *fixed effect* didapatkan nilai Tingkat Kemiskinan 60,91359 persen. Maka dapat diberikan asumsi terhadap variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk sebagai berikut:

1. Nilai konstanta variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota bernilai positif sebesar 0.00000000391. Hal ini berarti apabila nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota naik 1 juta maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0.00000000391.
2. Nilai konstanta variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja bernilai negatif sebesar -0,013478. Hal ini berarti apabila nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja naik 1 persen maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar -0,013478
3. Nilai konstanta variabel Indeks Pembangunan Manusia bernilai negatif sebesar -0,684813. Hal ini berarti apabila nilai Indeks Pembangunan Manusia naik 1 persen maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar -0,684813
4. Nilai konstanta variabel Jumlah Penduduk bernilai positif sebesar 0,162828. Hal ini berarti Apabila nilai Jumlah Penduduk naik 1 persen maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,162828.

4.2.2.2 Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menentukan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Ketentuan yang digunakan yaitu apabila nilai signifikan probabilitas $< 0,05$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan bila nilai signifikan probabilitas $> 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji t berdasarkan estimasi *fixed effect* sebagai berikut:

1. Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota

Pada variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota dihasilkan nilai koefisien sebesar 0.00000000391 yang menyatakan arah hubungan yang positif. Didapatkan pula nilai t-hitung sebesar 0,39562 dan nilai probabilitas sebesar 0,6906 $> 0,05$, yang berarti Upah Minimum Kabupaten/Kota tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Maka dapat dijelaskan Upah Minimum Kabupaten/Kota tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2021-2023. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 ditolak.

2. Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pada variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dihasilkan nilai koefisien sebesar -0,013478 yang menyatakan arah hubungan yang negatif. Didapatkan pula nilai t-hitung sebesar -1.152601 dan nilai probabilitas sebesar $0,2503 > 0,05$, yang berarti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Maka dapat dijelaskan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2021-2023. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 ditolak.

3. Variabel Indeks Pembangunan Manusia

Pada variabel Indeks Pembangunan Manusia dihasilkan nilai koefisien sebesar -0,684813 yang menyatakan arah hubungan yang negatif. Didapatkan pula nilai t-hitung sebesar -18.20700 dan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$, yang berarti Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Maka dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh negatif antara Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2021-2023. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 3 diterima.

4. Variabel Jumlah Penduduk

Pada variabel jumlah penduduk dihasilkan nilai koefisien sebesar 0,162828 yang menyatakan arah hubungan yang positif. Didapatkan pula nilai t-hitung sebesar 2.773913 dan nilai probabilitas sebesar $0,0060 < 0,05$, yang berarti jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Maka dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh antara jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2021-2023. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 4 diterima.

4.2.2.3 Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menentukan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Ketentuan yang digunakan yaitu apabila nilai F statistik $< 0,05$ maka secara simultan variabel independen berpengaruh dengan variabel dependen, sebaliknya apabila nilai F statistik $> 0,05$

maka secara simultan variabel independen tidak berpengaruh dengan variabel dependen.

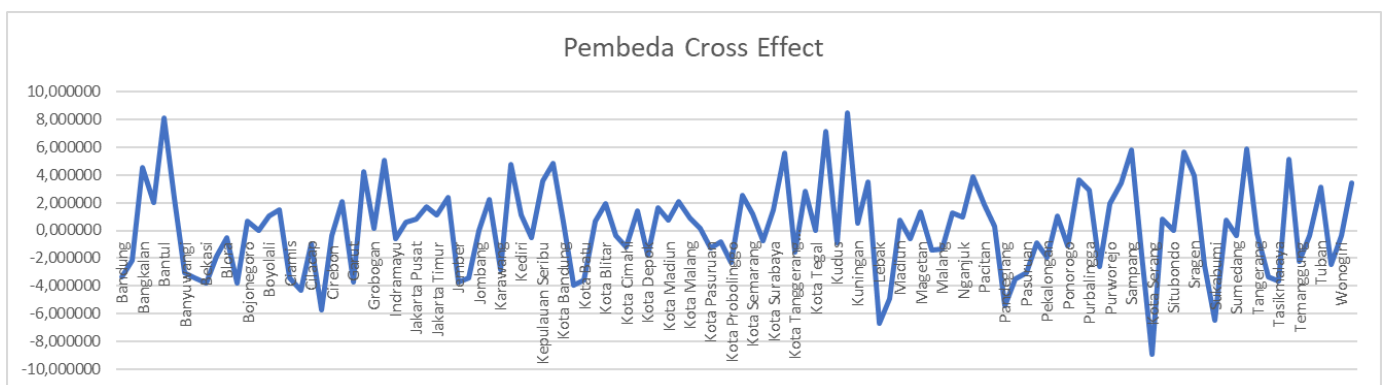
Berdasarkan hasil uji F pada estimasi *fixed effect* didapatkan nilai F–statistik adalah 381.9885 dengan nilai probabilitas F–statistik $0,000000 < 0,05$. Sehingga dapat dijelaskan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia dan jumlah penduduk secara simultan mampu mempengaruhi tingkat kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2021-2023.

4.2.2.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu berpengaruh terhadap variabel dependen. Ketentuan yang digunakan yaitu apabila nilai R^2 mendekati 1, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat baik, sebaliknya bila nilai R^2 mendekati 0 maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat rendah.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada estimasi *fixed effect* didapatkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.995004. Nilai tersebut menunjukkan bahwa persentase variasi variabel dependen Upah Minimum Kabupaten/Kota, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia dan jumlah penduduk sebesar 99,5%. Sedangkan sisanya 0,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

4.2.2.5 Persamaan Estimasi Intersep Pembeda Cross Effect

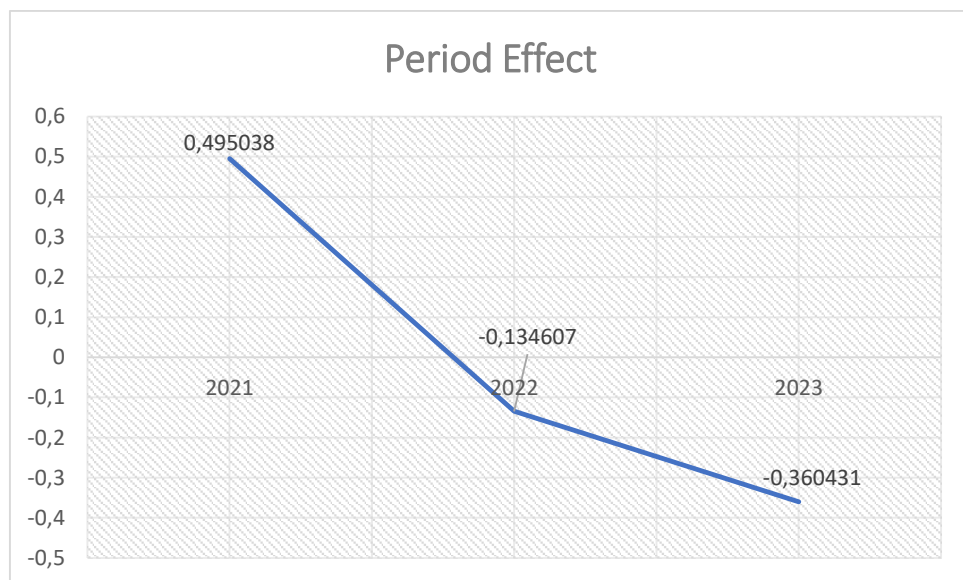


Gambar 4. 3 Koefisien Intersep Cros Effect

Sumber: Hasil pengolahan Eviews

Grafik 4.1 dihasilkan data koefisien intersep cross effect yang didapatkan dari hasil pengujian melalui model *fixed effect*. Didapatkan dari data 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa. Didapatkan koefisien intersep pembeda cross effect pada tingkat kemiskinan tertinggi yaitu terjadi di kabupaten Kulonprogo dengan nilai mencapai 8,463117, dan intersep pembeda cross effect pada tingkat kemiskinan terendah terjadi di kabupaten Serang dengan nilai mencapai -8,878908

4.2.2.6 Persamaan Estimasi Intersep Pembeda Period Effect



Gambar 4. 4 Koefisien Intersep Period Effect

Sumber: Hasil pengolahan Eviews

Grafik 4.2 menunjukkan bahwa koefisien *period effect* menggambarkan tingkat tingkat kemiskinan dengan nilai terendah dan tertinggi pada Tahun 2021 sampai 2023 di 119 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Didapatkan koefisien period effect pada tingkat kemiskinan tertinggi yaitu terjadi pada tahun 2021 dengan nilai mencapai 0,495038, dan period effect pada tingkat tingkat kemiskinan terendah terjadi pada tahun 2023 dengan nilai mencapai -0,360431.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Hubungan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil didapatkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2021-2023.

Tidak berpengaruhnya Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap kemiskinan ini menunjukkan bahwa faktor lain di luar kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota cenderung memiliki peran yang lebih dominan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Hal ini dapat terjadi karena dengan kenaikan upah minimum diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Namun, dalam kenyataannya, peningkatan Upah Minimum Kabupaten/Kota mungkin hanya berdampak pada segmen masyarakat yang menerima Upah Minimum Kabupaten/Kota, sementara sebagian besar penduduk miskin tidak terpengaruh karena mereka tidak bekerja di sektor formal yang memberlakukan Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Ningsih et al. (2023), dimana sebelumnya juga didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa upah minimum tidak selalu memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan. Dampak kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap kemiskinan yang tidak signifikan ini juga dapat dikaitkan dengan adanya kemungkinan pengaruh inflasi. Kenaikan upah minimum seringkali diikuti oleh peningkatan biaya produksi dan harga barang dan jasa, yang kemudian berdampak pada daya beli masyarakat secara keseluruhan. Penelitian lain oleh Utami & Rofiuddin (2022), menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum berbanding positif dengan tingkat kemiskinan, dimana kenaikan upah minimum bisa memicu pengangguran di kalangan pekerja dengan keterampilan rendah, karena perusahaan mungkin memilih untuk mengurangi jumlah tenaga kerja guna menekan biaya operasional. Akibatnya, kebijakan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang diharapkan mampu mengurangi kemiskinan justru memiliki efek samping yang membatasi kontribusinya terhadap peningkatan kemiskinan.

4.3.2 Hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil didapatkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2021-2023.

Ketiadaan signifikansi ini menunjukkan bahwa meskipun peningkatan partisipasi angkatan kerja mungkin memiliki potensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan dampaknya cenderung kecil atau terbatas dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang mungkin lebih dominan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang tinggi umumnya diharapkan dapat berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Namun, pada kenyataannya tidak semua individu yang masuk dalam angkatan kerja berhasil mendapatkan pekerjaan atau pekerjaan yang mampu memberikan penghasilan layak. Meskipun angka partisipasi angkatan kerja meningkat, ketersediaan pekerjaan dengan upah layak atau pekerjaan di sektor formal tetap terbatas. Akibatnya, sebagian besar angkatan kerja, terutama di sektor informal, tetap mengalami tingkat pendapatan yang rendah, sehingga kurang berpengaruh pada pengurangan kemiskinan secara signifikan.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Matondang et al. (2024), dimana didapatkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kenaikan partisipasi angkatan kerja tanpa disertai dengan peningkatan kualitas pekerjaan dan upah layak tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan secara signifikan. Penelitian oleh Salsabila et al. (2024), juga mendukung temuan ini bahwa peningkatan TPAK dapat memberi dampak negatif terhadap negatif pada tingkat kemiskinan. Sehingga peningkatan TPAK harus diiringi oleh kualitas pekerjaan yang memadai agar berdampak positif terhadap kesejahteraan. Faktor pendidikan, keterampilan, dan akses ke sektor pekerjaan formal menjadi penting agar TPAK dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.

4.3.3 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil didapatkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2021-2023.

IPM merupakan indikator penting yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia, meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Adanya signifikan yang terbentuk memperlihatkan bahwa peningkatan IPM berarti masyarakat memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai, serta peningkatan pendapatan. Kondisi ini pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan karena masyarakat yang lebih terdidik dan sehat cenderung memiliki kemampuan lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan cukup. Menurut teori ekonomi pembangunan, investasi dalam peningkatan kualitas hidup dapat menciptakan siklus positif di mana peningkatan kualitas sumber daya manusia meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya menekan angka kemiskinan.

Hasil ini didukung dengan penelitian Miftah et al. (2024), dimana didapatkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia mampu berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, peningkatan IPM di suatu wilayah berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Penelitian dengan hasil yang sama juga dikemukakan oleh Sagala et al. (2024), dimana didapatkan peningkatan IPM berhubungan erat dengan penurunan tingkat kemiskinan, terutama karena pendidikan dan kesehatan berperan sebagai faktor utama dalam meningkatkan peluang ekonomi masyarakat. Di Indonesia, peningkatan IPM dianggap mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan daya saing individu di pasar tenaga kerja formal. Hal ini memungkinkan individu untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan lebih tinggi yang bisa membantu mereka keluar dari garis kemiskinan.

4.3.4 Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil didapatkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2021-2023.

Adanya hubungan signifikan ini menunjukkan bahwa semakin tingginya jumlah penduduk di pulau jawa secara kuat dapat berdampak pada bertambahnya tingkat kemiskinan. Pulau Jawa yang merupakan salah satu daerah dengan populasi terpadat di Indonesia, peningkatan jumlah penduduk dapat semakin membebani sistem sosial dan ekonomi, khususnya di wilayah perkotaan. Tanpa kebijakan yang memperkuat penyediaan lapangan kerja, pendidikan, dan akses terhadap kebutuhan dasar, peningkatan jumlah penduduk akan semakin memicu peningkatan tingkat kemiskinan.

Penelitian sebelumnya mendukung hasil ini yaitu studi oleh Herlambang & Rachmawati (2023), dimana menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi yang pesat tanpa diiringi oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur cenderung meningkatkan kemiskinan di daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini juga sejalan dengan temuan yang disampaikan oleh Yuliansyah (2021), yang menemukan bahwa pertumbuhan penduduk berkontribusi pada peningkatan kemiskinan di Indonesia, karena terbatasnya lapangan kerja dan layanan sosial yang dapat diakses secara memadai oleh seluruh penduduk. Ketika jumlah penduduk meningkat, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, tempat tinggal, dan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga meningkat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko kemiskinan, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya dan kapasitas ekonomi

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2021 hingga 2023. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis. Hal ini berarti meskipun terjadi kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota, hal tersebut tidak berdampak pada peningkatan tingkat kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.
2. Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2021 hingga 2023. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis. Hal ini berarti meskipun terdapat peningkatan pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, hal tersebut tidak cukup untuk secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.
3. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2021 hingga 2023. Hasil ini sesuai dengan hipotesis. Hal ini berarti ketika terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, hal tersebut akan menurunkan tingkat kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa secara signifikan.
4. Variabel Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2021 hingga 2023. Hasil ini sesuai dengan hipotesis. Hal ini berarti ketika terjadi peningkatan jumlah penduduk, hal tersebut akan meningkatkan tingkat kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa secara signifikan.

5.2 Implikasi

1. Berdasarkan temuan bahwa upah minimum tidak berpengaruh dalam mengurangi kemiskinan mengindikasikan penting untuk mengembangkan kebijakan ekonomi makro yang lebih luas. Selain kebijakan upah, program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bantuan sosial harus diperkuat untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi kunci untuk membantu masyarakat memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi.
2. Berdasarkan temuan bahwa Tingkat Partisipasi Kerja tidak berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan, kualitas lapangan kerja perlu menjadi fokus utama. Menciptakan lapangan kerja dengan kualitas yang lebih baik dan meningkatkan keterampilan tenaga. Selain itu, kebijakan yang inklusif untuk meningkatkan partisipasi kelompok marginal, seperti perempuan dan penyandang disabilitas, harus didorong melalui akses pelatihan keterampilan dan kebijakan non-diskriminasi. Pendekatan ini akan lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan secara komprehensif. Program ini dapat menekan angka kemiskinan lebih efektif dibandingkan sekadar meningkatkan partisipasi kerja tanpa peningkatan kualitasnya.
3. Berdasarkan temuan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbukti berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, pemerintah harus meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar. Kebijakan ini penting untuk memberikan masyarakat peluang yang lebih baik dalam peningkatan taraf hidup serta membuka kesempatan yang lebih luas dalam ekonomi formal, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan kemiskinan secara signifikan.
4. Berdasarkan temuan bahwa jumlah penduduk terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana yang lebih efektif dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga. Hal ini dapat membantu menekan laju pertumbuhan penduduk dan menurunkan tekanan pada ketersediaan sumber daya serta layanan dasar di daerah padat penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmaddien, I & Susanto, B. (2020). *Eviews 9: Analisis Regresi Data Panel*. ISBN: 978-623-105-0. Kota Gorontalo : Diva Press
- Aprilianti, R., Messakh, G., Asiah, S., Nohe, D. (2022). Analisis Regresi Data Panel Pada Kasus Persentase Kemiskinan di Kalimantan Timur. *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, dan Aplikasinya*, 4(1), 845-855
- Aryanti, Harinda Gigih. (2016). *Ketenagakerjaan*. Klaten : Cempaka Putih.
- Ashari, R, T & Athoillah, M. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kawasan Tapal Kuda. *Journal Of Development Economic And Social Studies*, 2(2), 24-37
- Ayudia, N., Ciptawaty, U., Wahyudi, H., Yuliawan, D., Ratih, A. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan pada Daerah Tertinggal di Pulau Sumatera Berdasarkan Tipologi Klassen. *Journal of Education*, 6(3), 133-143
- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. (2020). *Kemiskinan*. Sumatera Utara : Badan Pusat Statistik <https://sulut.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja*. Tasikmalaya : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Kependudukan*. Sulawesi : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2023) *Profil Kemiskinan di Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Badan Pusat Statistik. *Indeks Pembangunan Manusia*. Maluku: Badan Pusat Statistik <https://halbarkab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>
- Elveira, C, D & Irawan, D. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Bruto Terhadap Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Bisnis Net*, 3(2), 55-69
- Furqoni, D., Junaidi, Bhakti, A. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Provinsi Di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 8(3), 922-936
- Gatiningsih. (2017) *Kependudukan dan Ketenagakerjaan*. Sumedang : Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN.

- Gujarati, D. N., & Porter, D. C (2015). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba empat.
- Herlambang, B & Rachmawati, N, S. (2023). Pengaruh PDRB, IPM, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(5), 80-93
- Herliana, Ellin. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Wanita dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Cirebon. *Jurnal Manajemen Borobudur*, 5(1), 1432-1442
- Hutasoid, Imelda. (2017). *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Bandung: Alfabeta
- Kominfo. (2015). *Program Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Maipita, Indra. 2014. *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Matondang, K. A., Nasution, N. F., Hasibuan, Z. H., & Siagian, A. P. (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(2), 460-468
- Miftah, S., Rizkidina, F., Asnidar, Ridha, A. (2023). Determinan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2(1) 89-101
- Ningsih, M., Nursini, N., & Sabir, S. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Inflasi dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Pulau Sulawesi. *Economics And Digital Business Review*, 4(2), 362-372
- Paelongan, P & Sandy, S. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Mimika. *Jurnal STIE JB*, 1(1), 67-81
- Panjaitan, Mangasi. (2020) Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jakarta Tahun 2016-2020. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 32-42
- Priseptian, L & Primandhana, W, P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1) 45-53
- Purba, D., Tarigan, I., Simamora, N., Pardede, N. (2024). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomidi Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 5(2), 11-23
- Purbowati, Ari. (2019). Kelahiran yang Tidak Direncanakan: Apakah Hambatan Bagi Wanita Untuk Bekerja?. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 14(1), 83-94
- Putra, N, M & Yasa, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kepulauan Nusa Tenggara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 9(8), 115-125

- Sagala, E, C.Y., Muchtar, M., Sihombing, P, R. (2024). Pengaruh Kelayakan Hidup dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan: Studi Pada 10 Provinsi Termiskin di Indonesia. *Ecoplan*, 7(1) 30-39
- Sagala, I. F., Romadhoni, A. F., Mardiana, A., Widyasari, A., Simamora, D. R., Nurfadiah, D., & Sihotang, R. F. (2024). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara Menggunakan Metode Regresi Linear Berganda. *Konstanta: Jurnal Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 2(2), 309-324
- Salsabila, S. I., Nabila, S., Rianti, R. A., Priyoga, D., & Sujianto, A. E. (2024). Pengaruh upah minimum dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur periode 2018-2022. *Journal of Administrative and Social Science*, 5(1), 92-107
- Salsabila, A., Juliannisa, I., Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 2(5), 95-106
- Saputra, I., Doloksaribu, A, L., Hukom, A. (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi*, 2(5), 344-354
- Sembiring, C., Masinambow, V., Tumangkeng, S. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kota-Kota Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(2),
- Sianipar, S, P., Masinambow, V., Lopian, A, L. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(1), 99-112
- Sinurat, R, P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Registratie*, 5(2) 87-103
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro P. Michael. 2014. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid 3*. Jakarta Penerbit : Erlangga
- Tuwonaung, B., Walewangko, E., Tolosang, K. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(6), 23-34
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*
- Utami, I. T., & Rofiuddin, M. (2022). Analisis pengaruh upah minimum, belanja pemerintah dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi mayoritas muslim. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 2(3), 145-160

- Witono, Toton. (2020) Pembangunan Sosial, Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, 14(1) 57-65
- Yasa, M. (2019). Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 5(4), 1-15
- Yono & Amelia, A. (2021). Upah Perspektif Islam dalam Pengembangan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 80-92
- Yuliansyah, Y. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Kalimantan Barat. *Cross-border*, 4(1), 629-641.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Tingkat Kemiskinan

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Tahun		
			2021	2022	2023
1	Jakarta	Kepulauan Seribu	15,06	14,11	13,13
2		Jakarta Selatan	3,56	3,52	3,1
3		Jakarta Timur	4,28	4,3	4,2
4		Jakarta Pusat	4,94	4,9	4,68
5		Jakarta Barat	4,31	4,22	4,09
6		Jakarta Utara	7,42	7,24	6,78
7	Jawa barat	Bogor	8,13	7,73	7,27
8		Sukabumi	7,7	7,34	7,01
9		Cianjur	11,18	10,55	10,22
10		Bandung	7,15	6,8	6,4
11		Garut	10,65	10,42	9,77
12		Tasikmalaya	11,15	10,73	10,28
13		Ciamis	7,97	7,72	7,42
14		Kuningan	13,1	12,76	12,12
15		Cirebon	12,3	12,01	11,2
16		Majalengka	12,33	11,94	11,21
17		Sumedang	10,71	10,14	9,36
18		Indramayu	13,04	12,77	12,13
19		Subang	10,03	9,75	9,52
20		Purwakarta	8,83	8,7	8,46
21		Karawang	8,95	8,44	7,87
22		Bekasi	5,21	5,01	4,93
23		Bandung Barat	11,3	10,82	10,52
24		Pangandaran	9,65	9,32	8,98
25		Kota Bogor	7,24	7,1	6,67
26		Kota Sukabumi	8,25	8,02	7,5
27		Kota Bandung	4,37	4,25	3,96
28		Kota Cirebon	10,03	9,82	9,16
29		Kota Bekasi	4,74	4,43	4,1
30		Kota Depok	2,58	2,53	2,38
31		Kota Cimahi	5,35	5,11	4,66
32		Kota Tasikmalaya	13,13	12,72	11,53
33		Kota Banjar	7,11	6,73	6,14
34	Jawa tengah	Cilacap	11,67	11,02	10,99
35		Banyumas	13,66	12,84	12,53
36		Purbalingga	16,24	15,3	14,99
37		Banjarnegara	16,23	15,2	14,9

38		Kebumen	17,83	16,41	16,34
39		Purworejo	12,4	11,53	11,33
40		Wonosobo	17,67	16,17	15,58
41		Magelang	11,91	11,09	10,96
42		Boyolali	10,62	9,82	9,81
43		Klaten	13,49	12,33	12,28
44		Sukoharjo	8,23	7,61	7,58
45		Wonogiri	11,55	10,99	10,94
46		Karanganyar	10,68	9,85	9,79
47		Sragen	13,83	12,94	12,87
48		Grobogan	12,74	11,8	11,72
49		Blora	12,39	11,53	11,49
50		Rembang	15,8	14,65	14,17
51		Pati	10,21	9,33	9,31
52		Kudus	7,6	7,41	7,24
53		Jepara	7,44	6,88	6,61
54		Demak	12,92	12,09	12,01
55		Semarang	7,82	7,27	7,17
56		Temanggung	10,17	9,33	9,26
57		Kendal	10,24	9,48	9,39
58		Batang	9,68	8,98	8,92
59		Pekalongan	10,57	9,67	9,67
60		Pemalang	16,56	15,06	15,03
61		Tegal	8,6	7,9	7,3
62		Brebes	17,43	16,05	15,78
63		Kota Magelang	7,45	7,75	6,11
64		Kota Surakarta	9,4	8,84	8,44
65		Kota Salatiga	5,14	4,73	4,66
66		Kota Semarang	4,56	4,25	4,23
67		Kota Pekalongan	7,59	7	6,81
68		Kota Tegal	8,12	7,91	7,68
69	Jawa timur	Pacitan	15,11	13,8	13,65
70		Ponorogo	10,26	9,32	9,53
71		Trenggalek	12,14	10,96	10,63
72		Tulungagung	7,51	6,71	6,53
73		Blitar	9,65	8,71	8,69
74		Kediri	11,64	10,65	10,72
75		Malang	10,5	9,55	9,45
76		Lumajang	10,05	9,06	8,93
77		Jember	10,41	9,39	9,51
78		Banyuwangi	8,07	7,51	7,34

79		Bondowoso	14,73	13,47	13,34
80		Situbondo	12,63	11,78	11,9
81		Probolinggo	18,91	17,12	17,19
82		Pasuruan	9,7	8,96	9,24
83		Sidoarjo	5,93	5,36	5
84		Mojokerto	10,62	9,71	9,8
85		Jombang	10	9,04	9,15
86		Nganjuk	11,85	10,7	10,89
87		Madiun	11,91	10,79	11,04
88		Magetan	10,66	9,84	9,8
89		Ngawi	15,57	14,15	14,4
90		Bojonegoro	13,27	12,21	12,18
91		Tuban	16,31	15,02	14,91
92		Lamongan	13,86	12,53	12,42
93		Gresik	12,42	11,06	10,96
94		Bangkalan	21,57	19,44	19,35
95		Sampang	23,76	21,61	21,76
96		Pamekasan	15,3	13,93	13,85
97		Sumenep	20,51	18,76	18,7
98		Kota Kediri	7,75	7,23	7,15
99		Kota Blitar	7,89	7,37	7,3
100		Kota Malang	4,62	4,37	4,26
101		Kota Probolinggo	7,44	6,65	6,48
102		Kota Pasuruan	6,88	6,37	6,6
103		Kota Mojokerto	6,39	5,98	5,77
104		Kota Madiun	5,09	4,76	4,74
105		Kota Surabaya	5,23	4,72	4,65
106		Kota Batu	4,09	3,79	3,31
107	DI Yogyakarta	Kulonprogo	18,38	16,39	15,64
108		Bantul	14,04	12,27	11,95
109		Gunungkidul	17,69	15,86	15,6
110		Sleman	8,64	7,74	7,52
111		Kota Yogyakarta	7,69	6,62	6,49
112	Banten	Pandeglang	10,72	9,32	9,27
113		Lebak	10,29	8,91	8,68
114		Tangerang	7,12	6,92	6,93
115		Serang	5,49	4,96	4,85
116		Tangerang	5,93	5,77	5,89
117		Cilegon	4,24	3,64	3,98
118		Kota Serang	6,79	5,94	6,2
119		Kota Tangerang Selatan	2,57	2,5	2,57

Lampiran 2 Data Upah Minimum Kabupaten/Kota

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Tahun		
			2021	2022	2023
1	Jakarta	Kepulauan Seribu	4.416.186	4.641.854	4.901.798
2		Jakarta Selatan	4.416.186	4.641.854	4.901.798
3		Jakarta Timur	4.416.186	4.641.854	4.901.798
4		Jakarta Pusat	4.416.186	4.641.854	4.901.798
5		Jakarta Barat	4.416.186	4.641.854	4.901.798
6		Jakarta Utara	4.416.186	4.641.854	4.901.798
7	Jawa barat	Bogor	4.217.206	4.217.206	4.520.212,25
8		Sukabumi	3.125.444,72	3.125.444	3.351.883,19
9		Cianjur	2.534.798,99	2.699.814	2.893.229,10
10		Bandung	3.241.929,67	3.241.929	3.492.465,99
11		Garut	1.961.085,70	2.326.772	2.117.318,31
12		Tasikmalaya	2.251.787,92	1.975.220	2.499.954,13
13		Ciamis	1.880.654,54	1.897.867	2.021.657,42
14		Kuningan	1.882.654,54	1.908.102	2.010.734,30
15		Cirebon	2.269.556,75	2.279.982	2.430.780,83
16		Majalengka	2.009.000	2.027.619	2.180.602,90
17		Sumedang	3.241.929,67	3.241.929	3.471.134,10
18		Indramayu	2.373.073,46	2.391.567	2.541.996,72
19		Subang	3.064.218,08	3.064.218	3.273.810,60
20		Purwakarta	4.173.568,61	4.173.568	4.464.675,02
21		Karawang	4.798.312	47.983.312	5.176.179,07
22		Bekasi	4.782.935,64	4.791.843	5.137.575,44
23		Bandung Barat	3.248.283,28	3.272.668	3.480.795,40
24		Pangandaran	1.860.591,33	1.884.364	2.018.389
25		Kota Bogor	4.169.806,58	4.330.249	4.639.429,39
26		Kota Sukabumi	2.530.182,63	2.562.434	2.747.774,86
27		Kota Bandung	3.742.276,48	3.774.860	4.048.462,69
28		Kota Cirebon	2.271.201,73	2.304.943	2.456.516,60
29		Kota Bekasi	4.782.935,64	4.816.912	5.158.248,20
30		Kota Depok	4.339.514,73	4.377.231	4.694.429,39
31		Kota Cimahi	3.421.929	3.272.668	3.514.093,25
32		Kota Tasikmalaya	2.264.093,28	2.363.389	2.553.341,02
33		Kota Banjar	1.831.884,83	1.852.009	1.998.119,05
34	Jawa tengah	Cilacap	2.228.904,00	2.230.731,00	2.383.090,00
35		Banyumas	1.970.000,00	1.983.261,00	2.118.124,00
36		Purbalingga	1.988.000,00	1.996.814,00	2.130.981,00
37		Banjarnegara	1.805.000,00	1.819.835,00	1.958.170,00

38		Kebumen	1.895.000,00	1.906.781,00	2.035.890,00
39		Purworejo	1.905.400,00	1.911.850,00	2.043.902,00
40		Wonosobo	1.920.000,00	1.931.285,00	2.076.209,00
41		Magelang	2.075.000,00	2.081.807,00	2.236.777,00
42		Boyolali	2.000.000,00	2.010.299,00	2.155.712,00
43		Klaten	2.011.515,00	2.015.623,00	2.152.323,00
44		Sukoharjo	1.986.450,00	1.998.153,00	2.138.248,00
45		Wonogiri	1.827.000,00	1.839.043,00	1.968.448,00
46		Karanganyar	2.054.040,00	2.064.313,00	2.207.484,00
47		Sragen	1.829.500,00	1.839.429,00	1.969.569,00
48		Grobogan	1.890.000,00	1.894.032,00	2.029.569,00
49		Blora	1.894.000,00	1.904.196,00	2.040.080,00
50		Rembang	1.861.000,00	1.874.322,00	2.015.927,00
51		Pati	1.953.000,00	1.968.339,00	2.107.697,00
52		Kudus	2.290.995,00	2.293.058,00	2.439.814,00
53		Jepara	2.107.000,00	2.108.403,00	2.272.627,00
54		Demak	2.511.526,00	2.513.005,00	2.680.421,00
55		Semarang	2.302.798,00	2.311.254,00	2.480.988,00
56		Temanggung	1.885.000,00	1.887.832,00	2.027.569,00
57		Kendal	2.335.735,00	2.340.312,00	2.508.300,00
58		Batang	2.129.117,00	2.135.535,00	2.282.026,00
59		Pekalongan	2.084.155,00	2.094.646,00	2.247.346,00
60		Pemalang	1.926.000,00	1.940.890,00	2.081.783,00
61		Tegal	1.958.000,00	1.968.446,00	2.106.238,00
62		Brebes	1.866.723,00	1.885.019,00	2.018.837,00
63		Kota Magelang	1.914.000,00	1.935.913,00	2.066.007,00
64		Kota Surakarta	2.013.810,00	2.035.720,00	2.174.169,00
65		Kota Salatiga	2.101.457,00	2.128.523,00	2.284.180,00
66		Kota Semarang	2.810.025,00	2.835.021,00	3.060.349,00
67		Kota Pekalongan	2.139.754,00	2.156.213,00	2.305.823,00
68		Kota Tegal	1.982.750,00	2.005.930,00	2.145.012,00
69	Jawa timur	Pacitan	1.961.154,77	1.961.154,77	2.157.270,25
70		Ponorogo	1.938.321,73	1.954.281,32	2.149.709,45
71		Trenggalek	1.938.321,73	1.944.932,74	2.139.426,01
72		Tulungagung	2.010.000,00	2.029.358,67	2.229.358,67
73		Blitar	2.004.705,75	2.015.071,18	2.215.071,18
74		Kediri	2.033.504,99	2.043.422,93	2.243.422,90
75		Malang	3.068.275,36	3.068.275,36	3.268.275,36
76		Lumajang	1.982.295,10	2.000.607,20	2.200.607,20
77		Jember	2.355.662,91	2.355.662,91	2.555.662,91
78		Banyuwangi	2.314.278,87	2.328.899,12	2.528.899,12

79		Bondowoso	1.954.705,75	1.958.640,12	2.154.504,13
80		Situbondo	1.938.321,73	1.942.750,77	2.137.025,85
81		Probolinggo	2.553.265,95	2.553.265,95	2.753.265,95
82		Pasuruan	4.290.133,19	4.365.133,19	4.515.133,19
83		Sidoarjo	4.293.581,85	4.368.581,85	4.518.581,85
84		Mojokerto	4.279.787,17	4.354.787,17	4.504.787,17
85		Jombang	2.654.095,88	2.654.095,88	2.854.095,88
86		Nganjuk	1.954.705,75	1.970.006,41	2.167.007,05
87		Madiun	1.951.588,16	1.958.410,31	2.154.251,34
88		Magetan	1.938.321,73	1.957.329,43	2.153.062,37
89		Ngawi	1.960.510,00	1.962.585,99	2.158.844,59
90		Bojonegoro	2.066.781,80	2.079.568,07	2.279.568,07
91		Tuban	2.532.234,77	2.539.224,88	2.739.224,88
92		Lamongan	2.488.724,77	2.501.977,27	2.701.977,27
93		Gresik	4.297.030,51	4.372.030,51	4.522.030,51
94		Bangkalan	1.954.705,75	1.956.773,48	2.152.450,83
95		Sampang	1.938.321,73	1.922.122,97	2.114.335,27
96		Pamekasan	1.938.321,73	1.939.686,39	2.133.655,03
97		Sumenep	1.954.705,75	1.978.927,22	2.176.819,94
98		Kota Kediri	2.085.924,76	2.118.116,63	2.318.116,63
99		Kota Blitar	2.004.705,75	2.039.024,44	2.239.024,44
100		Kota Malang	2.970.502,73	2.994.143,98	3.194.143,98
101		Kota Probolinggo	2.350.000,00	2.376.240,63	2.576.240,63
102		Kota Pasuruan	2.819.801,59	2.838.837,64	3.038.837,64
103		Kota Mojokerto	2.481.302,97	2.510.452,36	2.710.452,36
104		Kota Madiun	1.954.705,75	1.991.105,79	2.190.216,37
105		Kota Surabaya	4.300.479,19	4.375.479,19	4.525.479,19
106		Kota Batu	2.819.801,59	2.830.367,09	3.030.367,09
107	DI Yogyakarta	Kulonprogo	1.770.000	1.904.275	2.050.447
108		Bantul	1.805.000	1.916.848	2.066.439
109		Gunungkidul	1.842.460	1.900.000	2.049.266
110		Sleman	1.903.500	2.001.000	2.159.519
111		Kota Yogyakarta	2.069.530	2.153.970	2.324.776
112	Banten	Pandeglang	2.800.293	2.800.293	2.980.351
113		Lebak	2.751.314	2.773.590	2.944.665
114		Tangerang	4.230.793	4.230.793	4.527.689
115		Serang	4.215.181	4.215.181	4.492.961
116		Tangerang	4.262.015	4.285.799	4.584.519
117		Cilegon	4.309.773	4.340.254	4.657.223
118		Kota Serang	3.364.058	3.485.032	3.495.384
119		Kota Tangerang Selatan	4.230.793	4.280.214	4.551.452

Lampiran 3 Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Tahun		
			2021	2022	2023
1	Jakarta	Kepulauan Seribu	65,45	67,68	73,7
2		Jakarta Selatan	61,44	63,07	66,05
3		Jakarta Timur	60,85	61,26	65,11
4		Jakarta Pusat	63,17	63,6	63,98
5		Jakarta Barat	63,21	63,97	64,8
6		Jakarta Utara	65,79	64,34	65,5
7	Jawa barat	Bogor	62,55	63,75	64,22
8		Sukabumi	64,93	69,11	67,75
9		Cianjur	67,98	69,98	72,31
10		Bandung	65,12	63,64	67,1
11		Garut	62,76	68,84	70,1
12		Tasikmalaya	68,18	67,83	68,37
13		Ciamis	69,83	68,47	66,26
14		Kuningan	63,82	61,8	61,95
15		Cirebon	64,49	65,53	66,16
16		Majalengka	67,63	66,21	68,5
17		Sumedang	68,51	64,63	67,76
18		Indramayu	69,86	69,08	63,88
19		Subang	67,78	68,87	70,03
20		Purwakarta	61,13	65,21	66,37
21		Karawang	64,19	65,51	63,4
22		Bekasi	65,87	65,41	65
23		Bandung Barat	60,75	64,37	67,01
24		Pangandaran	74,75	79,92	80,15
25		Kota Bogor	61,77	64,21	64,81
26		Kota Sukabumi	56,86	62,48	62,57
27		Kota Bandung	65,31	69,42	66,97
28		Kota Cirebon	62,87	65,42	68,71
29		Kota Bekasi	64,76	65,33	64,65
30		Kota Depok	62,62	63,35	62,76
31		Kota Cimahi	61,79	67,22	68,43
32		Kota Tasikmalaya	65,75	65,99	65,44
33		Kota Banjar	64,07	63,76	67,44
34	Jawa tengah	Cilacap	62,91	65,65	66,6
35		Banyumas	65,07	64,75	64,6
36		Purbalingga	69,52	73,47	73,45
37		Banjarnegara	69,76	72,17	71,64

38		Kebumen	67,76	71,57	74,54
39		Purworejo	73,29	72,38	74,76
40		Wonosobo	70,77	74,55	73,59
41		Magelang	75,78	79,57	79,45
42		Boyolali	75,79	75,51	74,73
43		Klaten	66,89	68,66	66,71
44		Sukoharjo	68,78	67,38	67,66
45		Wonogiri	73,09	74,87	82,45
46		Karanganyar	73,15	70,7	70,69
47		Sragen	71,74	69,4	68,6
48		Grobogan	72,88	72,05	75,81
49		Blora	70,54	75,08	78,02
50		Rembang	70,67	73,98	72,75
51		Pati	68,99	71,52	73,1
52		Kudus	74,77	70,99	72,19
53		Jepara	69,55	69,74	71,57
54		Demak	66,23	66,97	70,76
55		Semarang	74,1	75,42	76,07
56		Temanggung	74,01	76,14	75,8
57		Kendal	69,93	73,44	76,93
58		Batang	71,4	74,9	76,62
59		Pekalongan	71,46	70,4	70,46
60		Pemalang	65,9	69,91	69,58
61		Tegal	66,24	65,54	67,61
62		Brebes	63,97	66,01	66,1
63		Kota Magelang	67,07	67,56	69,66
64		Kota Surakarta	66,89	68,15	69,18
65		Kota Salatiga	70,36	71	72,09
66		Kota Semarang	69,41	70,96	69,42
67		Kota Pekalongan	75,77	70,35	73,95
68		Kota Tegal	68,25	68,6	66,64
69	Jawa timur	Pacitan	80,57	82,99	81,64
70		Ponorogo	72,63	72,92	75,88
71		Trenggalek	72,36	72,01	80,72
72		Tulungagung	72,26	71,95	74,7
73		Blitar	70,44	72,79	73,5
74		Kediri	69,34	68,73	68,74
75		Malang	68,49	70,38	70,66
76		Lumajang	66,19	69,75	68,49
77		Jember	68,97	69,44	72,3
78		Banyuwangi	72,32	72	79,04

79		Bondowoso	73,89	74,61	74,39
80		Situbondo	71,63	72,15	75,28
81		Probolinggo	73,24	71,56	69,48
82		Pasuruan	69,03	70,19	71,21
83		Sidoarjo	66,47	72,87	69,62
84		Mojokerto	70,47	71,34	72,51
85		Jombang	70,69	66,65	71,91
86		Nganjuk	64,24	66,79	66,89
87		Madiun	67,77	72,72	72,49
88		Magetan	73,31	74,03	78,48
89		Ngawi	72,88	78,6	69,43
90		Bojonegoro	71,84	72,16	74,29
91		Tuban	73,77	73,63	74,73
92		Lamongan	70,72	69,3	75,08
93		Gresik	69,43	68,3	70,12
94		Bangkalan	68,66	73,86	71,49
95		Sampang	70,19	73,37	73,54
96		Pamekasan	65,88	73,59	77,14
97		Sumenep	75,63	75,12	78,86
98		Kota Kediri	67,35	69,93	71,83
99		Kota Blitar	69,96	67,78	72,26
100		Kota Malang	67,59	63,08	67,58
101		Kota Probolinggo	69,71	68,39	70,61
102		Kota Pasuruan	71,66	68,05	75,65
103		Kota Mojokerto	67,09	69,41	72,5
104		Kota Madiun	66,87	66,85	69,29
105		Kota Surabaya	67,3	69,99	68,73
106		Kota Batu	73,74	71,51	78,99
107	DI Yogyakarta	Kulonprogo	76,72	78,83	75,75
108		Bantul	71,64	74,39	75,06
109		Gunungkidul	75,99	74,07	76,66
110		Sleman	73,05	68,12	71,18
111		Kota Yogyakarta	71,86	72,48	73,2
112	Banten	Pandeglang	62,32	61,66	60,33
113		Lebak	66,75	66,17	67,9
114		Tangerang	63,94	67,05	66,87
115		Serang	63,86	64,25	63,22
116		Tangerang	64,52	66,08	63,39
117		Cilegon	61,37	67,39	62,7
118		Kota Serang	62,16	64,8	68,44
119		Kota Tangerang Selatan	62,56	58,67	60,5

Lampiran 4 Data Indeks Pembangunan Manusia

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Tahun		
			2021	2022	2023
1	Jakarta	Kepulauan Seribu	72,1	72,79	73,24
2		Jakarta Selatan	84,9	85,21	86,32
3		Jakarta Timur	82,97	83,45	83,85
4		Jakarta Pusat	81,56	82,11	82,38
5		Jakarta Barat	81,76	82,51	83,45
6		Jakarta Utara	80,51	80,81	81,34
7	Jawa barat	Bogor	70,6	71,2	71,78
8		Sukabumi	67,07	67,64	68,49
9		Cianjur	65,56	65,94	66,55
10		Bandung	72,73	73,16	73,74
11		Garut	66,45	67,41	68,11
12		Tasikmalaya	65,9	66,84	67,76
13		Ciamis	70,93	71,45	72,05
14		Kuningan	69,71	70,16	70,72
15		Cirebon	69,12	70,06	70,95
16		Majalengka	67,81	68,56	69,13
17		Sumedang	71,8	72,69	73,18
18		Indramayu	67,64	68,55	69,25
19		Subang	69,13	69,87	70,7
20		Purwakarta	70,98	71,56	72,09
21		Karawang	70,94	71,74	72,35
22		Bekasi	74,45	75,22	75,76
23		Bandung Barat	68,29	69,04	69,61
24		Pangandaran	68,28	69,03	69,38
25		Kota Bogor	76,59	77,17	77,85
26		Kota Sukabumi	74,6	75,4	76,32
27		Kota Bandung	81,96	82,5	83,04
28		Kota Cirebon	75,25	75,89	76,46
29		Kota Bekasi	81,95	82,46	83,03
30		Kota Depok	81,37	81,86	82,38
31		Kota Cimahi	78,06	78,77	79,46
32		Kota Tasikmalaya	73,31	73,83	74,47
33		Kota Banjar	71,92	72,55	73,08
34	Jawa tengah	Cilacap	70,42	70,99	71,83
35		Banyumas	72,44	73,17	73,86
36		Purbalingga	69,15	69,54	70,24
37		Banjarnegara	67,86	68,61	69,14

38		Kebumen	70,05	70,79	71,37
39		Purworejo	72,98	73,6	74,28
40		Wonosobo	68,43	68,89	69,37
41		Magelang	70,12	70,85	71,45
42		Boyolali	74,4	74,97	75,41
43		Klaten	76,12	76,95	77,59
44		Sukoharjo	77,13	77,94	78,65
45		Wonogiri	70,49	71,04	71,97
46		Karanganyar	75,99	76,58	77,31
47		Sragen	74,08	74,65	75,1
48		Grobogan	70,41	70,97	71,49
49		Blora	69,37	69,95	70,63
50		Rembang	70,43	71	71,89
51		Pati	72,28	73,14	73,59
52		Kudus	75,16	75,89	76,71
53		Jepara	72,36	73,15	73,85
54		Demak	72,57	73,36	74,07
55		Semarang	74,24	74,67	75,13
56		Temanggung	69,88	70,77	71,33
57		Kendal	72,5	73,19	73,86
58		Batang	68,92	69,45	70,2
59		Pekalongan	70,11	70,81	71,4
60		Pemalang	66,56	67,19	68,03
61		Tegal	68,79	69,53	70,23
62		Brebes	66,32	67,03	67,95
63		Kota Magelang	79,43	80,39	81,17
64		Kota Surakarta	82,62	83,08	83,54
65		Kota Salatiga	83,6	84,35	84,99
66		Kota Semarang	83,55	84,08	84,43
67		Kota Pekalongan	75,4	75,9	76,71
68		Kota Tegal	75,52	76,15	77,02
69	Jawa timur	Pacitan	68,57	69,37	70,19
70		Ponorogo	71,06	71,87	72,5
71		Trenggalek	70,06	71	71,73
72		Tulungagung	73,15	74,06	74,61
73		Blitar	71,05	71,86	72,49
74		Kediri	72,56	73,46	73,96
75		Malang	70,6	71,38	72,16
76		Lumajang	66,07	66,95	67,87
77		Jember	67,32	67,97	68,64
78		Banyuwangi	71,38	71,94	72,61

79		Bondowoso	66,59	67,31	67,99
80		Situbondo	67,78	68,25	69,16
81		Probolinggo	66,26	66,96	67,79
82		Pasuruan	68,93	69,68	70,29
83		Sidoarjo	80,65	81,02	81,55
84		Mojokerto	74,15	74,89	75,53
85		Jombang	73,45	74,05	74,6
86		Nganjuk	71,97	72,93	73,71
87		Madiun	71,88	72,39	72,97
88		Magetan	74,15	74,85	75,41
89		Ngawi	71,04	71,75	72,47
90		Bojonegoro	69,59	70,12	70,85
91		Tuban	68,91	69,67	70,34
92		Lamongan	73,12	74,02	74,53
93		Gresik	76,5	77,16	77,98
94		Bangkalan	64,36	65,05	65,75
95		Sampang	62,8	63,39	64,13
96		Pamekasan	66,4	66,99	67,96
97		Sumenep	67,04	67,87	68,61
98		Kota Kediri	78,6	79,59	80,44
99		Kota Blitar	78,98	79,93	80,63
100		Kota Malang	82,04	82,71	83,39
101		Kota Probolinggo	73,66	74,56	75,43
102		Kota Pasuruan	75,62	76,54	77,17
103		Kota Mojokerto	78,43	79,32	80,07
104		Kota Madiun	81,25	82,01	82,71
105		Kota Surabaya	82,31	82,74	83,45
106		Kota Batu	76,28	77,22	78,18
107	DI Yogyakarta	Kulonprogo	74,71	75,46	75,82
108		Bantul	80,28	80,69	81,74
109		Gunungkidul	70,16	70,96	71,46
110		Sleman	84	84,31	84,86
111		Kota Yogyakarta	87,18	87,69	88,61
112	Banten	Pandeglang	65,17	65,84	66,42
113		Lebak	64,03	64,71	65,21
114		Tangerang	72,29	72,97	73,43
115		Serang	66,82	67,75	68,39
116		Tangerang	78,5	78,9	79,46
117		Cilegon	73,35	73,95	74,54
118		Kota Serang	72,44	72,98	73,48
119		Kota Tangerang Selatan	81,6	81,95	82,28

Lampiran 5 Data Jumlah Penduduk

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Tahun		
			2021	2022	2023
1	Jakarta	Kepulauan Seribu	1,79	2,69	2,24
2		Jakarta Selatan	1,18	0,75	0,4
3		Jakarta Timur	1,09	1,17	0,8
4		Jakarta Pusat	0,34	1,53	1,14
5		Jakarta Barat	1,6	0,63	0,29
6		Jakarta Utara	1,22	0,76	0,41
7	Jawa barat	Bogor	1,54	1,46	1,32
8		Sukabumi	1,77	1,69	1,02
9		Cianjur	1,57	1,5	1,17
10		Bandung	1,56	1,49	0,97
11		Garut	0,99	0,92	1,36
12		Tasikmalaya	1,33	1,25	0,81
13		Ciamis	0,94	0,87	0,66
14		Kuningan	1,45	1,38	1,05
15		Cirebon	1,2	1,12	1,42
16		Majalengka	1,38	1,31	0,97
17		Sumedang	0,79	0,72	0,81
18		Indramayu	1,23	1,16	1,18
19		Subang	1,11	1,04	1,23
20		Purwakarta	1,82	1,75	1,41
21		Karawang	1,62	1,54	1,28
22		Bekasi	1,93	1,86	1,44
23		Bandung Barat	1,93	1,86	1,43
24		Pangandaran	1,24	1,17	0,67
25		Kota Bogor	1,19	1,12	0,96
26		Kota Sukabumi	1,73	1,65	1,48
27		Kota Bandung	0,48	0,41	0,92
28		Kota Cirebon	1,43	1,35	0,94
29		Kota Bekasi	1,12	1,04	1,18
30		Kota Depok	1,92	1,85	1,55
31		Kota Cimahi	0,76	0,69	1,41
32		Kota Tasikmalaya	1,45	1,37	1,29
33		Kota Banjar	1,62	1,55	1,17
34	Jawa tengah	Cilacap	5,34	5,37	5,35
35		Banyumas	4,87	4,88	4,87
36		Purbalingga	2,74	2,75	2,74
37		Banjarnegara	2,79	2,8	2,79

38		Kebumen	3,71	3,72	3,72
39		Purworejo	2,11	2,1	2,1
40		Wonosobo	2,41	2,42	2,42
41		Magelang	3,55	3,54	3,54
42		Boyolali	2,91	2,92	2,9
43		Klaten	3,45	3,45	3,42
44		Sukoharjo	2,48	2,48	2,48
45		Wonogiri	2,86	2,85	2,8
46		Karanganyar	2,56	2,56	2,54
47		Sragen	2,68	2,68	2,66
48		Grobogan	3,98	3,97	3,98
49		Blora	2,41	2,4	2,4
50		Rembang	1,76	1,76	1,76
51		Pati	3,62	3,62	3,62
52		Kudus	2,32	2,31	2,33
53		Jepara	3,23	3,22	3,25
54		Demak	3,3	3,3	3,3
55		Semarang	2,88	2,89	2,88
56		Temanggung	2,16	2,16	2,15
57		Kendal	2,79	2,79	2,8
58		Batang	2,2	2,2	2,21
59		Pekalongan	2,66	2,66	2,68
60		Pemalang	4,04	4,05	4,06
61		Tegal	4,38	4,38	4,41
62		Brebes	5,42	5,43	5,44
63		Kota Magelang	0,33	0,33	0,33
64		Kota Surakarta	1,42	1,41	1,4
65		Kota Salatiga	0,53	0,53	0,53
66		Kota Semarang	4,51	4,48	4,51
67		Kota Pekalongan	0,84	0,84	0,85
68		Kota Tegal	0,75	0,75	0,75
69	Jawa timur	Pacitan	0,78	0,68	0,12
70		Ponorogo	1,01	0,92	0,39
71		Trenggalek	0,78	0,69	0,5
72		Tulungagung	0,93	0,83	0,6
73		Blitar	0,89	0,79	0,88
74		Kediri	0,84	0,74	0,92
75		Malang	0,79	0,7	0,83
76		Lumajang	1,03	0,94	0,64
77		Jember	0,81	0,72	0,71
78		Banyuwangi	0,91	0,81	0,76

79		Bondowoso	0,51	0,41	0,56
80		Situbondo	0,56	0,46	0,58
81		Probolinggo	0,49	0,39	0,77
82		Pasuruan	0,58	0,48	0,86
83		Sidoarjo	0,68	0,58	1,14
84		Mojokerto	0,85	0,75	0,85
85		Jombang	0,89	0,8	0,91
86		Nganjuk	0,8	0,7	0,68
87		Madiun	1,14	1,04	0,49
88		Magetan	0,76	0,66	0,59
89		Ngawi	0,6	0,5	0,44
90		Bojonegoro	0,71	0,61	0,5
91		Tuban	0,67	0,57	0,62
92		Lamongan	1,28	1,18	0,68
93		Gresik	1,05	0,95	1,08
94		Bangkalan	1,53	1,43	1,07
95		Sampang	0,97	0,87	1,29
96		Pamekasan	0,64	0,54	1,09
97		Sumenep	0,74	0,64	0,71
98		Kota Kediri	0,64	0,54	2,94
99		Kota Blitar	1,19	1,09	2,86
100		Kota Malang	0,27	0,18	2,55
101		Kota Probolinggo	0,96	0,86	3,08
102		Kota Pasuruan	1,07	0,98	4,04
103		Kota Mojokerto	0,94	0,84	2,8
104		Kota Madiun	1,29	1,19	2,45
105		Kota Surabaya	0,37	0,28	1,29
106		Kota Batu	1,1	1,01	3,38
107	DI Yogyakarta	Kulonprogo	0,59	0,58	0,56
108		Bantul	0,94	0,92	0,9
109		Gunungkidul	0,21	0,2	0,19
110		Sleman	1,07	1,05	1,03
111		Kota Yogyakarta	0,1	0,08	0,07
112	Banten	Pandeglang	0,99	1,64	1,54
113		Lebak	1,38	2,03	1,93
114		Tangerang	1,32	1,97	1,87
115		Serang	1,42	2,07	1,97
116		Tangerang	0,51	1,16	1,05
117		Cilegon	1,46	2,11	2,01
118		Kota Serang	1,76	2,42	2,31
119		Kota Tangerang Selatan	0,47	1,12	1,01

Lampiran 6 Hasil Deskriptif Statistik

	INDEKS PE...	JUMLAH P...	TINGKAT KEMISKINAN	TINGKAT PARTISI...	UMR
Mean	73.70415	1.608768	9.777171	69.44490	2845666.
Median	72.79000	1.190000	9.520000	69.41000	2251788.
Maximum	88.61000	5.440000	23.76000	82.99000	47983312
Minimum	62.80000	0.070000	2.380000	56.86000	1770000.
Std. Dev.	5.336700	1.155494	3.949630	4.615483	2583414.
Skewness	0.538358	1.293664	0.567938	0.220828	15.04114
Kurtosis	2.541766	4.204082	3.238592	2.766686	262.5560
Jarque-Bera	20.36829	121.1432	20.03874	3.711238	1015579.
Probability	0.000038	0.000000	0.000045	0.156356	0.000000
Sum	26312.38	574.3300	3490.450	24791.83	1.02E+09
Sum Sq. Dev.	10139.01	475.3195	5553.451	7583.756	2.38E+15
Observations	357	357	357	357	357

Lampiran 7 Hasil Penentuan Model Estimasi

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	192.090194	(118,234)	0.0000
Cross-section Chi-square	1636.344895	118	0.0000

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	38.875490	4	0.0000

Lampiran 8 Hasil Uji Common Effect

Dependent Variable: TINGKAT_KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 11/07/24 Time: 06:45

Sample: 2021 2023

Periods included: 3

Cross-sections included: 119

Total panel (balanced) observations: 357

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	27.36551	3.437630	7.960573	0.0000
UMR	-1.29E-07	5.89E-08	-2.187041	0.0294
TINGKAT_PARTISIPASI_ANGKATAN_KERJA	0.215622	0.033273	6.480448	0.0000
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	-0.439883	0.028475	-15.44802	0.0000
JUMLAH_PENDUDUK	0.140107	0.129185	1.084550	0.2789
R-squared	0.511052	Mean dependent var	9.777171	
Adjusted R-squared	0.505496	S.D. dependent var	3.949630	
S.E. of regression	2.777418	Akaike info criterion	4.894827	
Sum squared resid	2715.347	Schwarz criterion	4.949137	
Log likelihood	-868.7267	Hannan-Quinn criter.	4.916429	
F-statistic	91.97837	Durbin-Watson stat	0.129580	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 9 Hasil uji Random Effect

Dependent Variable: TINGKAT_KEMISKINAN
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 11/07/24 Time: 06:49
 Sample: 2021 2023
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 119
 Total panel (balanced) observations: 357
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	56.00661	2.004683	27.93790	0.0000
UMR	1.17E-09	9.79E-09	0.119659	0.9048
TINGKAT_PARTISIPASI_ANGKATAN_KERJA	-0.015788	0.010876	-1.451683	0.1475
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	-0.615458	0.029054	-21.18292	0.0000
JUMLAH PENDUDUK	0.140119	0.056668	2.472605	0.0139
Effects Specification				
		S.D.	Rho	
Cross-section random		2.728688	0.9843	
Idiosyncratic random		0.344341	0.0157	
Weighted Statistics				
R-squared	0.585192	Mean dependent var	0.710457	
Adjusted R-squared	0.580478	S.D. dependent var	0.557347	
S.E. of regression	0.360997	Sum squared resid	45.87212	
F-statistic	124.1463	Durbin-Watson stat	1.808531	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.393082	Mean dependent var	9.777171	
Sum squared resid	3370.487	Durbin-Watson stat	0.024614	

Lampiran 10 Hasil uji Fixed Effect

Dependent Variable: TINGKAT_KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 11/07/24 Time: 06:47

Sample: 2021 2023

Periods included: 3

Cross-sections included: 119

Total panel (balanced) observations: 357

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	60.91359	2.482678	24.53544	0.0000
UMR	3.91E-09	9.82E-09	0.398562	0.6906
TINGKAT_PARTISIPASI_ANGKATAN_KERJA	-0.013478	0.011694	-1.152601	0.2503
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	-0.684813	0.037613	-18.20700	0.0000
JUMLAH PENDUDUK	0.162828	0.058700	2.773913	0.0060

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.995004	Mean dependent var	9.777171
Adjusted R-squared	0.992399	S.D. dependent var	3.949630
S.E. of regression	0.344341	Akaike info criterion	0.972293
Sum squared resid	27.74556	Schwarz criterion	2.308319
Log likelihood	-50.55424	Hannan-Quinn criter.	1.503688
F-statistic	381.9885	Durbin-Watson stat	2.972716
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 11 Hasil Uji Koefisien Intersept Pembeda Cross Effect

Dependent Variable: TINGKAT_KEMISKINAN?

Method: Pooled Least Squares

Date: 11/07/24 Time: 09:13

Sample: 1 3

Included observations: 3

Cross-sections included: 119

Total pool (balanced) observations: 357

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	60.69611	2.474277	24.53085	0.0000
UMR?	3.95E-09	9.83E-09	0.401637	0.6883
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA?	-0.681766	0.037451	-18.20434	0.0000
TINGKAT_PARTISIPASI ANGKATAN KER...	-0.014282	0.011677	-1.223100	0.2225
JUMLAH PENDUDUK?	0.165073	0.058699	2.812180	0.0053
Fixed Effects (Cross)				
BANDUNG--C	-3.302548			
BANDUNG_BARAT--C	-2.173573			
BANGKALAN--C	4.564182			
BANJARNEGARA--C	2.021518			
BANTUL--C	8.107462			
BANYUMAS--C	2.302784			
BANYUWANGI--C	-3.067379			
BATANG--C	-3.415168			
BEKASI--C	-3.788610			
BLITAR--C	-1.845891			
BLORA--C	-0.520210			
BOGOR--C	-3.796625			
BOJONEGORO--C	0.638753			
BONDOWOSO--C	0.002860			
BOYOLALI--C	1.057299			
BREBES--C	1.499960			
CIAMIS--C	-3.432076			
CIANJUR--C	-4.281125			
CILACAP--C	-0.973078			
CILEGON--C	-5.741481			
CIREBON--C	-0.387270			
DEMAK--C	2.056211			
GARUT--C	-3.745443			
GRESIK--C	4.228031			
GROBOGAN--C	0.153221			
GUNUNGKIDUL--C	5.035906			
INDRAMAYU--C	-0.602561			
JAKARTA_BARAT--C	0.563215			
JAKARTA_PUSAT--C	0.784214			
JAKARTA_SELATAN--C	1.732971			
JAKARTA_TIMUR--C	1.143675			
JAKARTA_UTARA--C	2.377832			

JEMBER--C	-3.711587
JEPARA--C	-3.407110
JOMBANG--C	0.016374
KARANGANYAR--C	2.243599
KARAWANG--C	-2.810631
KEBUMEN--C	4.786747
KEDIRI--C	1.137568
KENDAL--C	-0.520608
KEPULAUAN_SERIBU--C	3.571655
KLATEN--C	4.809558
KOTA_BANDUNG--C	0.588377
KOTA_BANJAR--C	-3.913339
KOTA_BATU--C	-3.561524
KOTA_BEKASI--C	0.683220
KOTA_BLITAR--C	1.969324
KOTA_BOGOR--C	-0.347058
KOTA_CIMAHI--C	-1.188761
KOTA_CIREBON--C	1.421152
KOTA_DEPOK--C	-1.795112
KOTA_KEDIRI--C	1.670761
KOTA_MADIUN--C	0.752380
KOTA_MAGELANG--C	2.083827
KOTA_MALANG--C	0.878417
KOTA_MOJOKERTO--C	0.129297
KOTA_PASURUAN--C	-1.284220
KOTA_PEKALONGAN--C	-0.846464
KOTA_PROBOLINGGO--C	-2.299376
KOTA_SALATIGA--C	2.549336
KOTA_SEMARANG--C	1.177040
KOTA_SUKABUMI--C	-0.752032
KOTA_SURABAYA--C	1.500227
KOTA_SURAKARTA--C	5.569668
KOTA_TANGGERANG_SELATAN--C	-1.578317
KOTA_TASIKMALAYA--C	2.829094
KOTA_TEGAL--C	0.015159
KOTA_YOGYAKARTA--C	7.127768
KUDUS--C	-0.874350
KULONPROGO--C	8.463117
KUNINGAN--C	0.493459
LAMONGAN--C	3.457409
LEBAK--C	-6.675504
LUMAJANG--C	-4.874608
MADIUN--C	0.778578
MAGELANG--C	-0.578006
MAGETAN--C	1.358798
MAJALENGKA--C	-1.414730
MALANG--C	-1.340808
MOJOKERTO--C	1.250204
NGANJUK--C	0.945147
NGAWI--C	3.888519
PACITAN--C	1.861629
PAMEKASAN--C	0.320183

	PANDEGLANG--C	-5.422357	
	PANGANDARAN--C	-3.467156	
—	PASURUAN--C	-3.043619	
	PATI--C	-0.896782	
	PEKALONGAN--C	-1.913082	
	PEMALANG--C	1.010931	
	PONOROGO--C	-1.116572	
	PROBOLINGGO--C	3.643507	
	PURBALINGGA--C	2.863889	
	PURWAKARTA--C	-2.630375	
	PURWOREJO--C	1.943357	
	REMBANG--C	3.392245	
	SAMPANG--C	5.785283	
	SEMARANG--C	-1.773119	
	SERANG--C	-8.878908	
	SERANG--C	-8.878908	
	SIDOARJO--C	0.852364	
	SITUBONDO--C	-1.015301	
	SLEMAN--C	5.634456	
	SRAGEN--C	3.933614	
	SUBANG--C	-2.488379	
	SUKABUMI--C	-6.466277	
	SUKOHARJO--C	0.777597	
	SUMEDANG--C	-0.343739	
	SUMENEP--C	5.848325	
	TANGERANG--C	-0.248460	
	TANGGERANG--C	-3.366671	
	TASIKMALAYA--C	-3.633776	
	TEGAL--C	-5.152016	
	TEMANGGUNG--C	-2.223783	
	TRENGGALEK--C	-0.139817	
	TUBAN--C	3.140313	
	TULUNGAGUNG--C	-2.465572	
	WONOGIRI--C	-0.395820	
	WONOSOBO--C	3.384100	
Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.995025	Mean dependent var	9.764398
Adjusted R-squared	0.992431	S.D. dependent var	3.962277
S.E. of regression	0.344715	Akaike info criterion	0.974466
Sum squared resid	27.80593	Schwarz criterion	2.310493
Log likelihood	-50.94219	Hannan-Quinn criter.	1.505862
F-statistic	383.6120	Durbin-Watson stat	2.970111
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 12 Hasil Uji Koefisien Intersept Period Effect

Dependent Variable: TINGKAT_KEMISKINAN?

Method: Pooled Least Squares

Date: 11/07/24 Time: 09:24

Sample: 1 119

Included observations: 119

Cross-sections included: 3

Total pool (balanced) observations: 357

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.37701	3.525958	7.197196	0.0000
UMR?	-1.17E-07	5.88E-08	-1.983254	0.0481
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KER...	0.233404	0.033969	6.871106	0.0000
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA?	-0.430489	0.028624	-15.03964	0.0000
JUMLAH PENDUDUK?	0.156702	0.128758	1.217031	0.2244
Fixed Effects (Cross)				
2021--C	0.495038			
2022--C	-0.134607			
2023--C	-0.360431			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.518973	Mean dependent var	9.777171
Adjusted R-squared	0.510727	S.D. dependent var	3.949630
S.E. of regression	2.762690	Akaike info criterion	4.889700
Sum squared resid	2671.359	Schwarz criterion	4.965734
Log likelihood	-865.8114	Hannan-Quinn criter.	4.919942
F-statistic	62.93500	Durbin-Watson stat	1.442116
Prob(F-statistic)	0.000000		